







Laporan KEPALA ANRI

Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman Jakarta, 12 Juni 2023











Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Pusat Studi Arsip Kepresidenan



Jln. Gadjah Mada 111 Jakarta Barat



ANRI AMPERA

Jl. Ampera Raya No 7 Jakarta Selatan



Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Bogor



Balai Arsip Statis dan Tsunami Pusat Studi Arsip Kebencanaan



Pusat Jasa Kearsipan

Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi



Dilar Itama WUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA

- Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Menjaga dan mengelola sumber daya laut. fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan.
- 3 Komitmen pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim: membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Diplomasi maritim, mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
- Membangun kekuatan pertahanan maritim









Sumber antarafoto











TUJUAN

Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Ketahanan Budaya Bangsa yang Tangguh

Sasaran Strategis

- Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan
- Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional
- Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima

Arah Kebijakan:

- Kualitas Kebijakan
- Kapabilitas Penyelenggara (Lembaga & SDM/Arsiparis)

KLASTER 2

Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan melalui Pengawasan

Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN

nhub. KLHK, KemenBUMN

penyelenggaraan pelayanan dasar

KLASTER 3

Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM

KLASTER 4

Kemengarekraf/Bagarekraf

Arah Kebijakan:

- Perlindungan & Penyelamatan Arsip dari Bencana
- Penyelamatan Arsip Statis periode Kabinet 2014-2019
- Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19
- Pengembangan Platform Kearsipan di IKN Baru
- Pengelolaan Arsip KL yang pindah ke IKN Baru
- Pusat Studi Arsip (tsunami-Kepresidenan, Pemberantasan Korupsi)
- Pengelolaan Arsip Statis

Arah Kebijakan:

- Pelayanan & Pemanfaatan Arsip Autentik
- Penyelenggaraan SJIKN
- Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan
- Penguatan Strategi dan Sistem Pelayanan

PRIORITAS PROGRAM

KEARSIPAN NASIONAL

TERTIB ARSIP

MKB

TRANSFORMASI DIGITAL

KLASTER 1

- Wakit Presiden secara langsung
- infrastruktur dasar di DCN (Kamanisminfo
- Alut Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang NI-AD TNI-AL TNI-AU Mabes Politi

- Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA MK, KY, BPK)
- Kemenko Pohukam, Kemenko PMK, Kemenko

- HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, SKX MIGAS, BP Batam, BKPRN, BP2MI, Baznas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komite Profesi Akuntan Publik, Badan Pertimbangan Kesehat. Nasional, Badan Pengawas Rumah Sakit, Lembaga Sensor Film, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keperawatan Indonesia

Lembaga Non Struktural (LNS) KPU, Bawasili, DKPP, PPATK, ORL KASN, 8 BNPP KIP KKIP DPOD







"Tinggalkan cara lama dalam mengelola arsip"

>> arahan Presiden pada Hari Kearsipan Ke-50 (9 Juni 2021)

CARA LAMA

Tidak efisien, akses yang lamban, dan penyimpanan yang tersebar di mana-mana

Inovasi & Adaptasi TIK

CARA BARU BERBASIS DIGITAL

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Cara melacak dan identifikasi arsip secara cepat.

Registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas.

Sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan

HASIL

Kearsipan lebih terintegrasi, efisien dan efektif.

Lembaga pemerintah pusat dan daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri.

Arsip menjadi landasan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Arsip sangat penting sebagai lompatan kemajuan.

Arsip menjadi rujukan di dalam negeri maupun internasional untuk berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

Dokumentasi kekayaan seni budaya dan penyajian yang menarik untuk membangun kecintaan















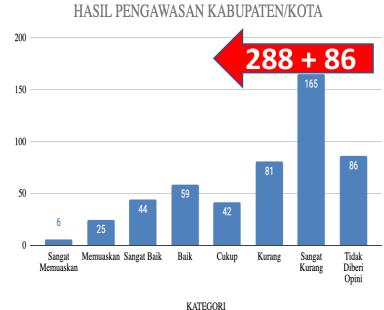




KINERJA KEARSIPAN TAHUN 2022

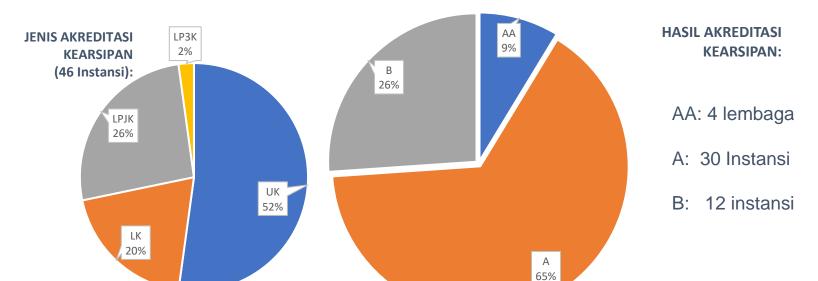






Layanan Akreditasi Kearsipan diberikan terhadap **46 instansi**, meliputi:

- 1. Unit Kearsipan (UK): 24 Instansi
- 2. Lembaga Kearsipan (LK): 9 Instansi
- Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan (LPJK): 12 Instansi
- 4. Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (LP3K): 1 Instansi



Kinerja Penerapan SRIKANDI

1. Jumlah instansi yang telah menerapkan:

Instansi/Pemda	Sosialisasi/Bimtek	Penerapan
Instansi Pusat	105	71
Provinsi	13	25
Kabupaten/Kota	374	205
Jumlah	492	291

2. Jumlah pengguna : 1.448.271 ASN

3. Jumlah naskah dinas : 19.762.062 naskah arsip



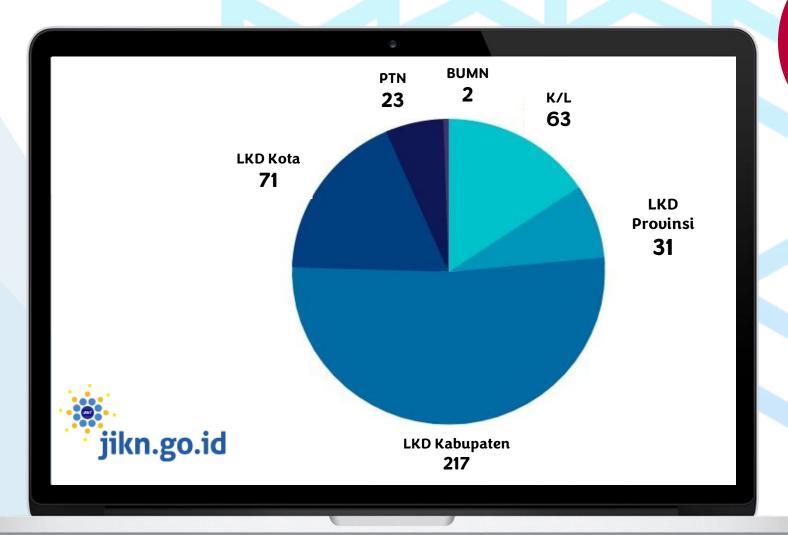












ANGGOTA SIMPUL JARINGAN PUSAT JARINGAN NASIONAL

407

TOTAL JUMLAH SIMPUL JARINGAN



Terdiri:

63 – K/L

31 – LKD Provinsi

217 – LKD Kab

71 — LKD Kota

2 – BUMN

23 - PTN













Jumlah Khasanah Arsip menurut Media

2. Foto 3.477.270 1930 - sekarang

Lembar

3. Peta	131.802 Lembar	1629 - sekarang

1945 - 1991 4. Film 59.055 Reel

1973 - 2018 5. Rekaman Suara 54.735 Kaset

14.502 Roll 6. Mikro Film 1596 - 1981

1891 - 1974 7. Microfische 14.373 Fische

8. Video 27.480 Kaset 1973 - 2016

1945 - 2001 9. Reel To Reel Sound **946 Reel**

10. Optical Disc 17.463 Keping

11. Piringan Hitam 101 Keping 1945 - 1963

12. Digital 632, 08 TB













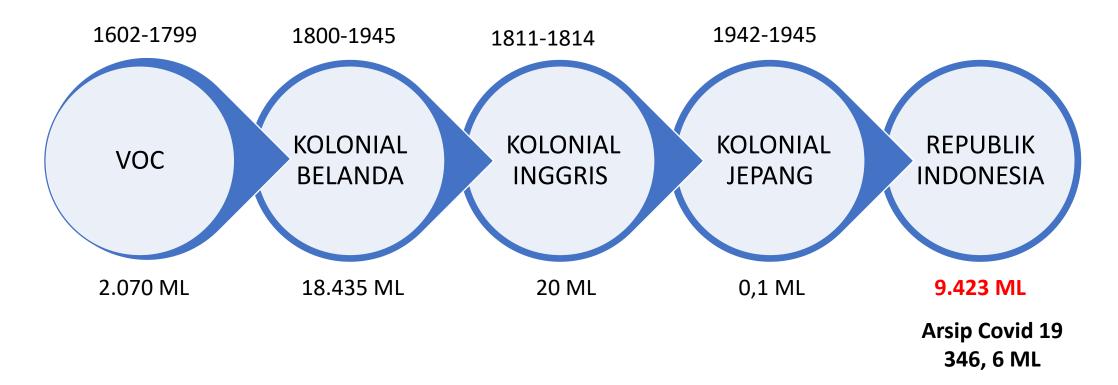








KHASANAH ARSIP KERTAS 30.332,20 ML









Arsip Terjaga

35,88ML



12 Warisan Dokumenter Dunia (MoW-UNESCO)



MEMORI KOLEKTIF BANGSA





MOW UNESCO, 2023

- Arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh - Sukabumi
- Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah 1996-2000
- 3. Arsip Kamp Pengungsi Pulau Galang "Wajah Humanisme Indonesia"
- 4. Arsip Selokan Mataram sebagai Memori Kolektif Bangsa
- 5. Khazanah Arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R. Soeharso, Surakarta 1950-1980 (MOWCAP, 2022)

- 1. Arsip Pabrik Semen Pertama di Indonesia
- 2. Arsip Studiefonds
- 3. Arsip Kesenian Tari Khas Mangkunegaran
- 4. Arsip Pembangunan Infrastruktur Pendidikan pada masa Kolonial
- 5. Arsip Yogya sebagai Ibu Kota Negara RI
- 6. Arsip PT Garam
- 7. Arsip Pusat Penelitian Gula Indonesia
- 8. Arsip Belitong UNESCO Geopark

DIPERSIAPKAN MENJADI MOW UNESCO

Disamping:
Arsip Kartini dan Gender
Indonesia, Arsip
Pembentukan ASEAN, Arsip
Jalur Rempah, dll

NILAI KEEKONOMIAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 2022 sd. Mei 2023

Rp. 3.275.919.011.736











TERIMA KASIH











PENYELAMATAN ARSIP KEMARITIMAN

disampaikan oleh:

Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si. **Sekretaris Jenderal** Kementerian Dalam Negeri











Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 2 Mei 1964

Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Riwayat Pendidikan:

❖ APDN Riau 1987

❖ S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990

❖ S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003

S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Keluarga:

❖ Istri : Hj. Nani Nofiar

❖ Anak :

1. M. Septian Putra Perdana

2. Dwi Pebranadian Putra

3. Tri Diana Putri

4. Muhammad Aufa Fauzantara

5. Muhammad Insan Annafis

Curriculum Vitae









Curriculum Vitae

Riwayat pekerjaan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2022 s.d saat ini)
- 2. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Mei 2022 s.d saat ini)
- 3. Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (2021)
- 4. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan (2015 s.d 2022)
- 5. Penjabat Gubernur Kepri (18 Feb 2021 25 Feb 2021)
- 6. Plt. Sestama BNPP (2018 s.d. 2021)
- 7. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016)
- 8. Rektor IPDN, 2013-2015
- 9. Sekretaris Daerah Prov. Kepulauan Riau, 2010-2013
- 10. Kepala Bappeda Prov. Kepulauan Riau, 2008-2010
- 11. Kepala Badan Kepegawaian Prov. Kepulauan Riau, 2007-2008
- 12. Kepala Bappeda Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, 2004-2007
- 13. Kadispenda Kab. Karimun, Prov. Riau 2000-2004
- 14. Camat Karimum, Kab. Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1999-2000
- 15. Camat Kundur Kab. Kepulauan Riau, Prov. Riau 1996-1999
- 16. Camat Serasan Kab. Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1993-1995
- 17. Sekwilcam Karimun, Kab. Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1991-1993







Curriculum Vitae

Organisasi:

- Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012
 (sampai Penegerian Universitas Maritim Raja Ali Haji)
- 2. Ketua Kwarda Pramuka Prov. Kepulauan Riau
- 3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov. Kep. Riau
- 4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Prov. Kepulauan Riau
- 5. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) (2016-2020)
- 6. Wakil Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) (2016 s.d 2020)
- 7. Ketua Komite SMPN 109 Jakarta Timur (2018 s.d saat ini)



PENYELAMATAN ARSIP

Tindakan atau langkah- langkah penarikan atau pengambil alihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.







Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 34

Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaanya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 34

Negara secara khusus memberikan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud (1) berkaitan pada ayat yang dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.





Berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kewenangan Kearsipan Dijelaskan Sebagaimana Dalam Pasal 34 Berikut:

- Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.
- Pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ANRI, pencipta arsip, dan pihak terkait.

Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan badan Nasional Penanggulangan bencana











URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

- Tenaga kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- 10. Komunikasi & Informatika
- 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- 12. Penanaman modal
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga
- 14. Statistik
- 15. Persandian
- 16. Kebudayaan
- 17. Perpustakaan

18.Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

- Kelautan dan perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.













URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

PEMBAGIAN URUSAN PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

- a. Persetujuan tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi negeri.
- Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan perusahaan swasta yang kegiatannya

- a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.
- Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota.

- Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.
- Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA











DUKUNGAN PENYELAMATAN ARSIP MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN





Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Mendagri No. **050-5889 Tahun 2021** Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Pedoman Pemda dalam Menyusun APBD);
- Permendagri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam tiap tahunan;
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah















BERPEDOMAN PADA: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI

HAL YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH BIRO UMUM

Biro Umum secara khusus melakukan perlindungan dan penyelamatan serta memberitahukan dan melaporkan kepada ANRI arsip yang berkaitan dengan:

- **Arsip Bahasa Belanda** a.
- **Arsip G30/ SPKI**
- **Keputusan Menteri tentang SK** C. Kepala Daerah/Bupati/Walikota
- **Arsip Covid**

perlindungan dan penyelamatan arsip pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri sejak tahun 1950
- Keputusan Menteri Dalam Negeri 1966
- Arsip kependudukan
- Arsip kewilayahan
- Arsip kepulauan
- Arsip perbatasan
- Arsip kontrak kerja dan masalah pemerintahan yang strategis.
- Arsip organisasi kemasyarakatan
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Inspektorat Jenderal
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Arsip Masalah Hukum
- Arsip aset











Arah Kebijakan Penganggaran APBD Urusan **Kearsipan (Permendagri 84 Tahun 2022)**

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Arsip Negara, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam **APBD** untuk

identifikasi Arsip Negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah;

penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan; dan

pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan







REPUBLIK INDONESI

ISU STRATEGIS URUSAN KEARSIPAN

Jumlah SDM Kearsipan yang belum sesuai kebutuhan dan belum merata serta masih rendahnya kompetensi SDM Kearsipan.

> **Pemenuhan Kebutuhan SDM** Kearsipan

02

Pengembangan e-Arsip, e-Office dan Big Data

sebagai perwujudan tata

kelola administrasi pemerintahan yang

akuntabel, efektif dan

manajemen pengetahuan

efisien serta pondasi

pemerintah

03

04

Penataan Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi

01

Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah dan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 43/2009 tentang Kearsipan.

Pelayanan Kearsipan

Pemanfaatan dan

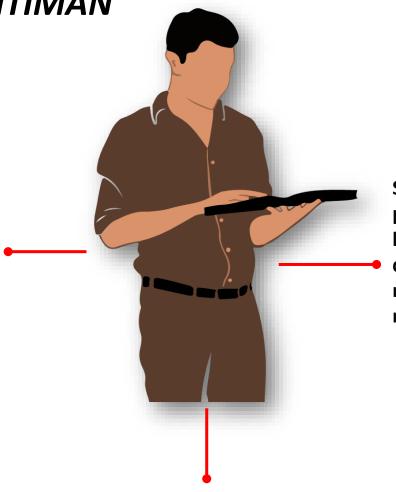
Pelayanan arsip kolektif memori dapat yang diri bangsa

sebagai bangsa dengan membangun sistem diakses masyarakat sebagai bentuk penguatan identitas dan jati



URGENSI KEARSIPAN KEMARITIMAN

melihat bagaimana untuk poros benar-benar maritim Nusantara penakluk maritim unggul, yang terhebat berasal dari kawasan Indonesia Timur, seperti NTT dan Papua.



Sejarah Maritim memegang peranan penting dalam kajian komunikasi lintas budaya, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain yang menjadi dasar bagi proses integrasi masyarakat Indonesia

Beragamnya potensi maritim Indonesia yang perlu diarsipkan











Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara serta dilindungi secara khusus oleh negara



Arsip berperan penting sebagai Memori Kolektif Bangsa, arsip dapat dipergunakan untuk memaknai sejarah perjalanan bangsa, nilainilai yang melandasi semangat perjuangan para pendiri bangsa, serta proses yang berlangsung setelah kemerdekaan berhasil diperoleh.



Penyelamatan arsip kemaritiman ini untuk mengembalikan jati diri indonesia sebagai negara maritim dan menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia





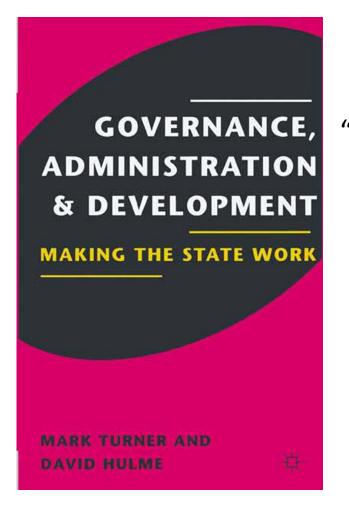
Identifikasi Arsip Negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah











Menurut Mark Turner & David Hulme (1997): "... Negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sustainable

seperti Korea Selatan, Singapura, Thailand dan Malaysia memiliki organisasi sektor publik yang efektif"

Mentransformasi organisasi pemerintahnya menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan













5 PRIORITAS KERJA



PEMBANGUNAN SDM

SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK.Mengundang talenta global

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- Penghubung produksi dan distribusi.
- Mempermudah akses wisata.
- Mendongkrak lapangan kerja.
- oNilai tambah perekonomian.

SIMPLIKASI REGULASI

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus law

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional
- Penyesuaian Mekanisme Kerja

TRANSFORMASI EKONOMI

Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025



- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

DYNAMIC GOVERNANCE 2019

Menjadi 2024 **Pemerintahan Kelas Dunia**

Republik Indonesia

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

RULE BASED BUREAUCRACY

2014

Perpres No. 81 Th. 2010

2010

Roadmap 2010-2014 Periode I

Roadmap 2015-2019 Periode II

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

Roadmap 2020-2025 Periode III

OLD PUBLIC ADMINISTRATION

NEW PUBLIC MANAGEMENT **GOVERNANCE**

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025











PENYEDERHANAAN BIROKRASI



MANDAT PRESIDEN



"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural!
Agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah!"

Pidato Presiden 20 Oktober 2019



ARAH PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PENYEDERHANAAN BIROKRASI

....hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik.

Sumber: Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

hal 264



Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

G2O
INDONESIA
2022



PENYEDERHANAAN BIROKRASI



PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI HANYA 2 LAYER



Pemerintah yang bersih, akuntabel, dar berkinerja tinggi



Pemerintah yang efektif dan efisien



Pelayanan publik yang baik dan berkualitas



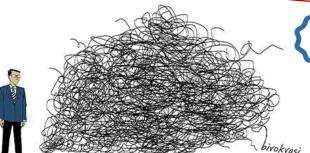
Pemerintahan Belum Bersih, Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

REFORMASI BIROKRASI



• 3 SASARAN

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien





Pelayanan Publik Masih Buruk









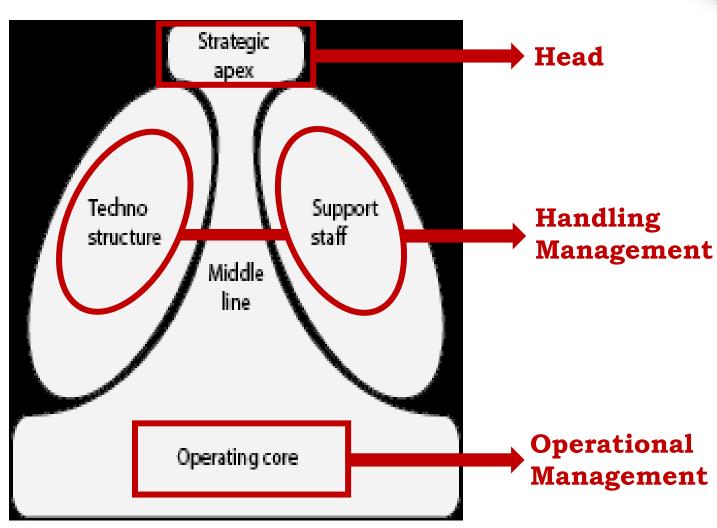


MODEL ORGANISASI by HENRY MINTZBERG (1979)



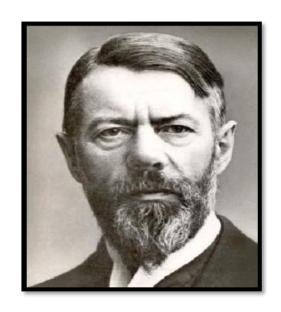


Henry Mintzberg





WEBERIAN, NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN NEW PUBLIC SERVICE



Max Weber
(Tahun 1922)

"Weberian stratification or the three class system"



Christopher Hood
Tahun 1991

"A Public Management
for All Seasons"





Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt

Tahun 2003

The New Public Service: Serving, Not Steering



POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH



INDONESIA NEGARA KESATUAN YANG DESENTRALISTIK DAERAH = UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH





FUNGSI PEMERINTAHAN









TUNTUTAN PELAYANAN PUBLIK





- FASTER (LEBIH CEPAT)
- SMARTER (LEBIH PINTAR)
- CHEAPER (LEBIH MURAH)
- EASIER (LEBIH MUDAH)
- BETTER (LEBIH BAIK)



PEMERINTAHAN KOLABORATIF

(COLLABORATIVE GOVERNANCE)



 Collaborative governance merupakan Sebuah bentuk baru konsep kerja sama yang ingin kita kembangkan lebih intensif dalam mendorong inovasi dan pembangunan daerah.

disebut

- Konsep ini mengedepankan adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu :
 - 1. Pemerintah
 - 2. Swasta
 - 3. Akademisi
 - 4. Masyarakat
 - 5. Media
- Beberapa faktor penting untuk mewujudkan Collaborative Governance antara lain :
 - Kepemimpinan,
 - Ketergantungan satu dengan yang lain,
 - 3. Insentif yang jelas, proses pembuatan kebijakan,
 - 4. Sumber daya yang dimiliki,
 - 5. Sistem kolaborasi program pembangunan,
 - 6. Serta dampak yang dihasilkan.

Pentahelix Collaboration

"Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau,masyarakat"

Ansell & Grash (2007)



INDONESIA DIDOMINASI MILENIAL DAN GEN Z

Sensus penduduk tahun 2020 mencatat total populasi Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa dan didominasi oleh generasi **Milenial** dan **Gen Z**.



Sumber: katadata.co.id



Perkembangan Revolusi Industri

Revolusi Industri 1.0

Revolusi Industri 2.0

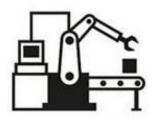
Revolusi Industri 3.0

Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 5.0











Mekanisasi, Tenaga Air dan Uap

Produksi Massal, Tenaga Listrik, Perakitan Komputer, Produksi Otomatis, dan Elektronik Cyber-Physical Systems, IoT, Jaringan, Pembelajaran Mesin

Kolaborasi Manusia dan Robot, Sistem Kognitif, dan Penyesuaian









KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4.0



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan



PERATURAN MENTERI **DALAM NEGERI NOMOR** 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH







Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan



PERATURAN MENTERI **DALAM NEGERI NOMOR** 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN **DATA PROFIL DESA DAN** KELURAHAN





SIOLA

MS

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SIMPEG-KDN adalah rangkaian informasi dan data Pegawai yang disusun secara sistematik, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.



PERATURAN MENTERI DALAM **NEGERI NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN** DALAM NEGERI



G.I.S. **DUKCAPIL**



E-DATABASE



PUJA INDAH



PEMDA 4.0

Kompas.com / Regional

Cetak Akta Kelahiran di Surabaya Kini Tak Perlu ke Dispendukcapil, Cukup di Rumah Sakit, Bidan, atau Klinik

INOVASI

Makassar, Kota dengan Sistem CCTV Komprehensif Pertama di Indonesia





"Pada waktu istri saya melahirkan, saya minta surat keterangan dari RS, baru setelah itu saya ke Dispendukcapil. Tapi mulai hari ini, karena kehebatan anda semua, ketika keluar dari RS atau bidan, para orangtua sudah bisa bawa pulang akta kelahirannya,"

Walikota Surabaya Eri Cahyadi di Balaikota 11 Juni 2021

"Saya sudah mutar ke seluruh kota besar se-Indonesia. Baru kali ini, hanya di Makassar, saya lihat ada sistem CCTV yang sangat komprehensif,"

Kapolri Tito Karnavian pada Giat Kunker ke Makassar 12 April 2017



Revolusi Besar Sedang Terjadi Dalam Layar Kecil Dalam Genggaman





Kekuatan Viral, Berkat 1 video viral di *TikTok* yg ditonton lebih dari 6,5 jt orang memberikan promosi senilai miliaran rupiah secara gratis

















Munculnya berbagai aplikasi yg merubah gaya dan cara hidup masyarakat





Langkah Tindak Lanjut Kemendagri terhadap Arahan presiden pada tanggal 27 Juli 2021 terkait Core Values ASN dan Employer Branding ASN



DAN REFORMANI BIBLISHIKASI REPUBLIE PUDONOSIA

1. Bapak/bu Menteri Kabinet Indonesia Maju:

2. Bapak Sekretarts Kabinet.

1. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia.

4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia:

6. Bapak Kapala Intelijen Neganz

7. Bapak/bu Kapala Lembaga Pemerintah

5. Bapak/bu Pinginan Kasekretarlatan Lenthaga Negara:

9. Bapak/bu Pinginan Kasekwiariatan Lembaga Non Struktural

10. Bapak/bu Pimpinari Lambapa Panylaran Publik;

11. Bapak/bu Gubemur.

12. Bapak/Ibu Bupati; dan

12. Bapak/bu Welkota.

BURAT EDARAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIRCKRASI

MOMOR: 20 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI COPE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka penguatan Sudaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN meruju pemerintahan berkelas dunis (world class government) sensi untuk melaksanakan ketertuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perlaku Undang-undang Noner 5 tahun 2014 tentang Aperatur Sipli Negara dipertukan keseragaman nilai-kilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Surat Edaran KemenPAN & RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara



2.6 Agustus 2021







Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



Jakarta, 24 November 2021

Yth. 1. Gubernur, dan

2. Bupati/Wali kota

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/6559/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Sehubungan dengan arahan Presiden RI pada peluncuran Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang perlunya keseragaman nilai-nilai dasar ASN dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disampaikan bahwa:

- 1. Pemerintah Daerah harus melakukan penyesualan nilal-nilai budaya kerja yang telah ada di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi core values ASN BerAKHLAK, yang terdiri dari:
 - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara:
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- 2. ASN diseluruh Pemerintah Daerah agar menerapkan employer branding yang sama yaitu "Bangga Melayani Bangsa".



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Implementasi Core Values dan **Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) di** Lingkungan Pemerintah Daerah



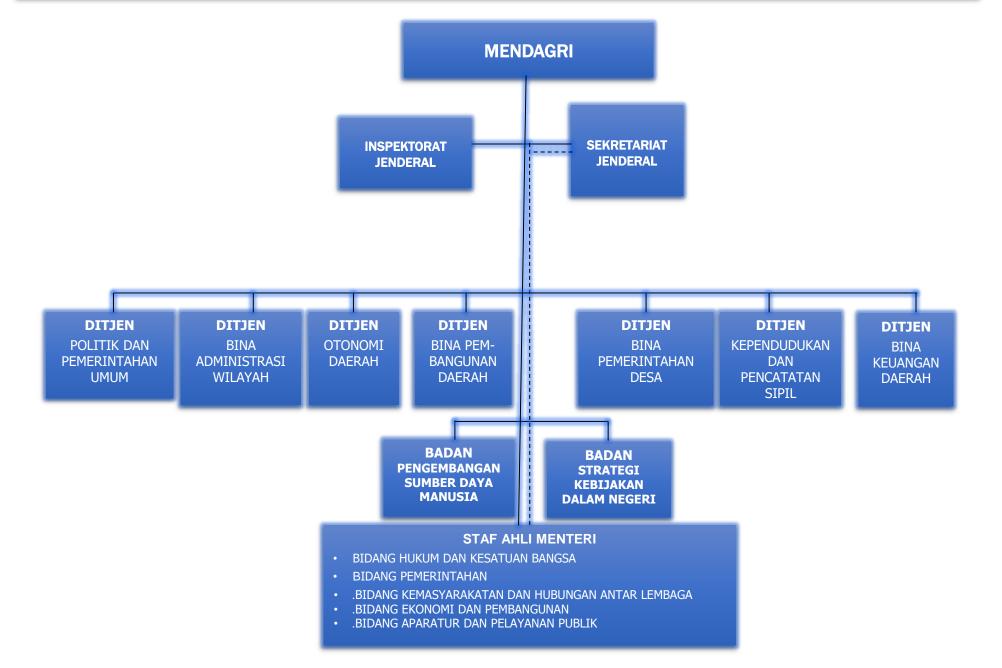






Struktur Organisasi Kemendagri





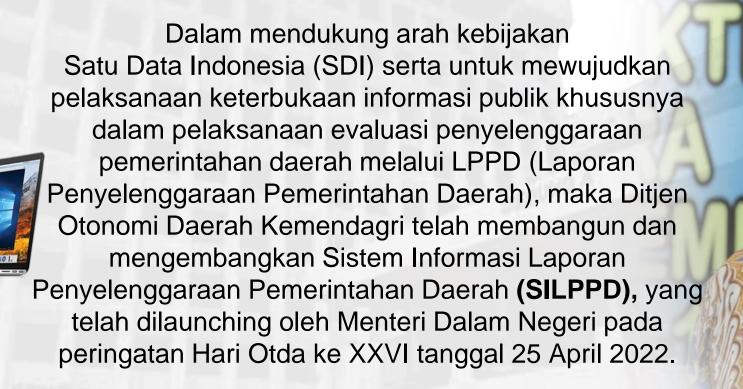


LAUNCHING SIPD OLEH KPK





PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SILPPD)





DASAR HUKUM

UU 23/2014

Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.



PERPRES 95/2018 TTG SPBE | PASAL 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

PERPRES 39/2019 TTG SDI | PASAL 2

Satu Data Indonesia bertujuan **memberikan acuan** pelaksanaan dan pedoman bagi **Instansi Pusat dan instansi Daerah** dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola Data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya terkait dengan Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik:

DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI (KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)



Dikelola dalam
Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
(Permendagri 70/2019)

Jenis Informasi:

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lainnya



Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

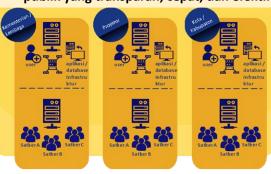
- Kementerian Bappenas (domain data dan informasi),
- Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
- BSSN (domain keamanan informasi)
- Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

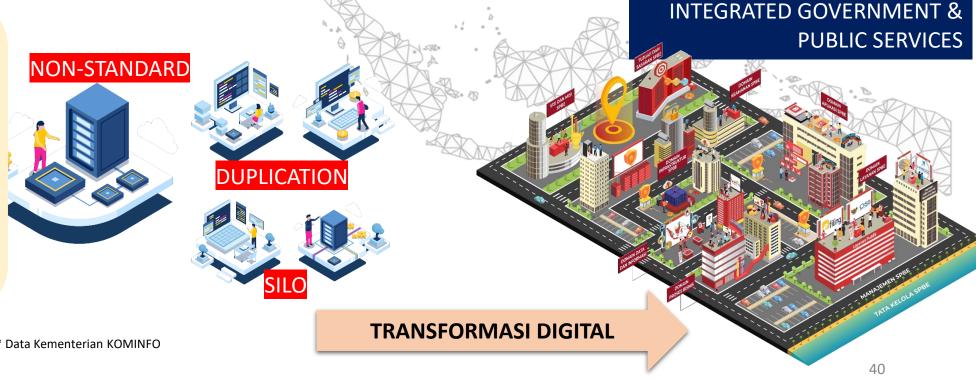
ARSITEKTUR SPBE

(Enterprise Government Architecture)

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024

- 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.*
- 2700 pusat data/ruang server.*
- Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri.
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.





KELEBIHAN SIPD

DATA MENGALIR

Satu sistem informasi terintegrasi berdasarkan alur proses yang datanya mengalir dan terjadwal 2



TERDOKUMENTASI

Memiliki **jejak digital** terpusat sesuai dengan user dan hak akses berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing

3

UPDATE SESUAI REGULASI

Menggunakan bagan akun standar yang terupdate dan mengikuti regulasi terbaru 4

TRANSPARAN

Seluruh data tercatat secara lengkap dan terkini serta diinformasikan kepada Perangkat Daerah secara transparan

GRATIS

Biaya **pengembangan sistem**, dan **infrastruktur server** tidak dibebankan kepada Pemda

6



AMAN

Telah dilakukan uji keamanan informasi oleh BSSN dengan hasil tingkat kerentanan rendah pada thn 2021 dan celah keamanan closed thn 2022 artinya tidak ditemukan celah keamanan

7



MICROSERVICES

SIPD telah dikembangan berbasis **arsiktektur microservices** sesuai dengan rekomendasi Kemenkominfo, KemenpanRB dan BRIN 8



ASSESMENT

Telah dilakukan **assesment**oleh tim STRANAS PK dan
PUSILKOM UI dengan
memberikanrekomendasi
pengembangan SIPD

9



TERINTEGRASI

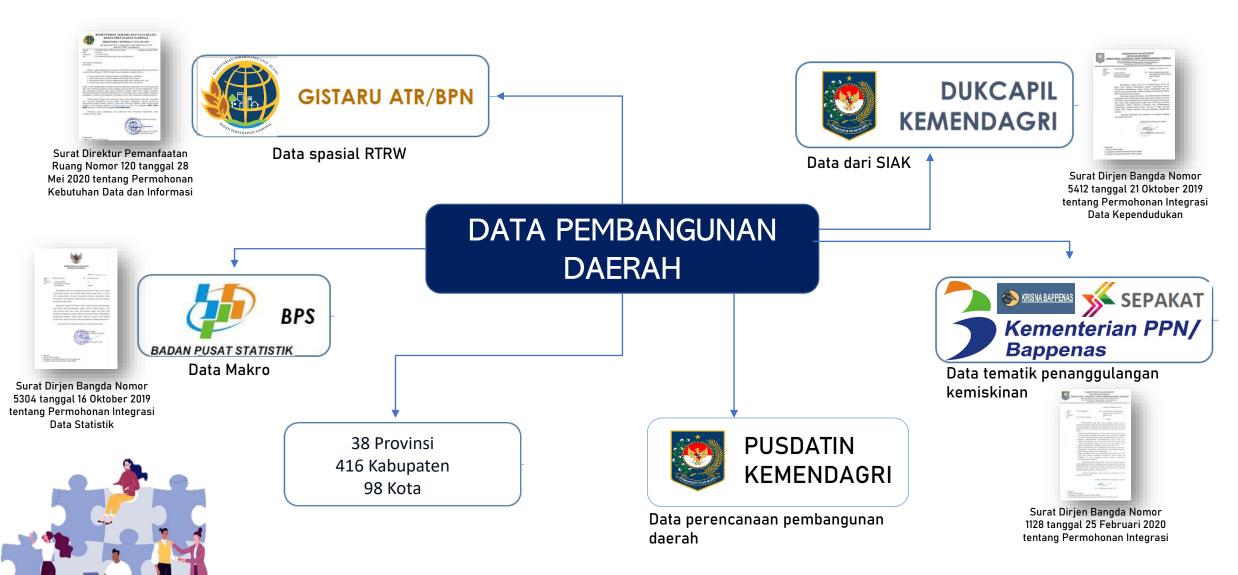
Telah **terintegrasi** dengan berbagai aplikasi K/L dalam **berbagi pakai data** 10



MUDAH

Mempermudah
penyampaian informasi
dari dan antar tingkatan
pemerintahan pusat dan
daerah

INTEGRASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Progres Integrasi SIPD dengan K/L



Dari SIPD:

data RAPBD, APBD, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan, sehingga daerah tidak perlu input ulang ke **SiRUP**



Dari SIPD:

Data RAPBD untuk Evaluasi RAPBD

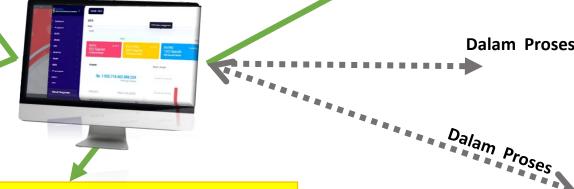




Data APBD, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, sehingga daerah tidak perlu input ulang ke SIKD



KEMENKEU



Dalam Proses



Dari SIPD:

Data perencanaan dan penganggaran

dari SIPD:

SIP3DN

Kementerian

Perindustrian

Data Penetapan APBD untuk melihat komitmen PDN

dari SIP3DN:

Data Produk /sertifikat TKDN, untuk memudahkan daerah mengecek Prosentase TKDN **Produk pada SIPD**

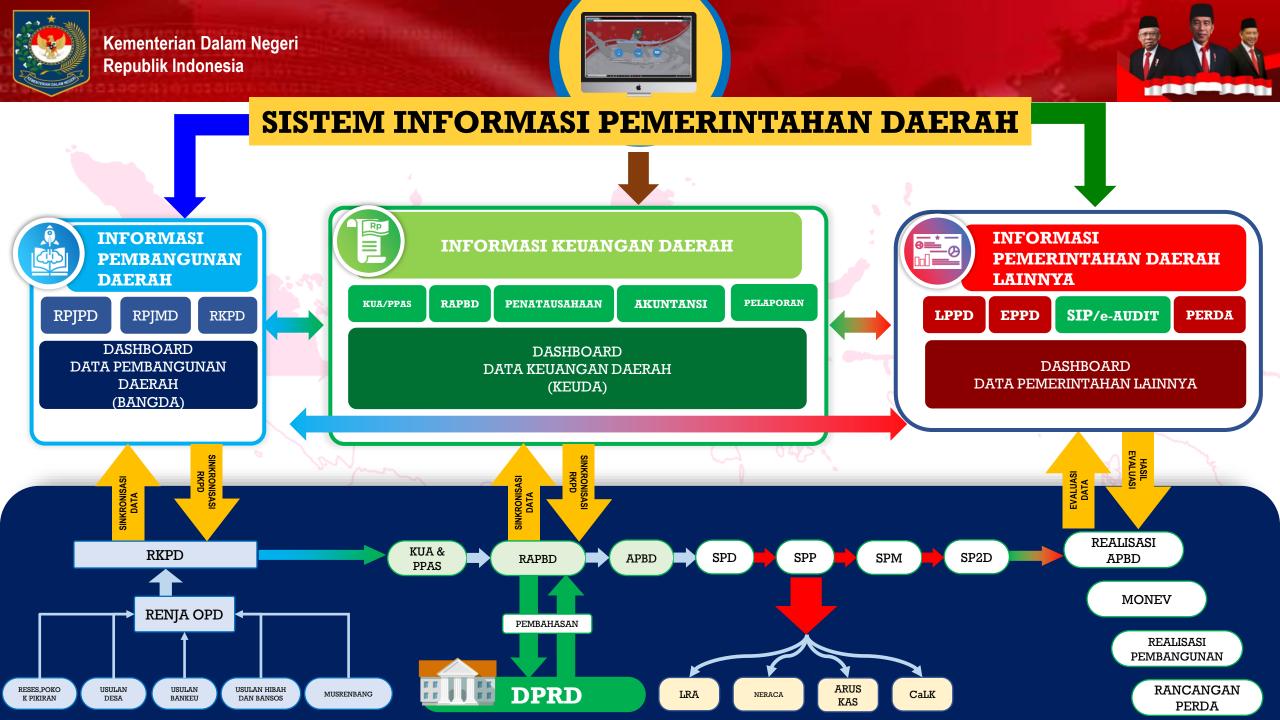


dari SIPD:

Data Standar Harga (SSH), sebagai acuan standar biaya untuk rincian belanja

dari MARKAS/ARKAS:

- **Data Rincian Belanja**
- Data Realisasi Penerimaan,
 - Untuk catatan pada akutansi pelaporan di SIP





Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

Konsepsi Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Pusat Peradaban Maritim Dunia

Mochammad Firman Hidayat

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12 Juni 2023



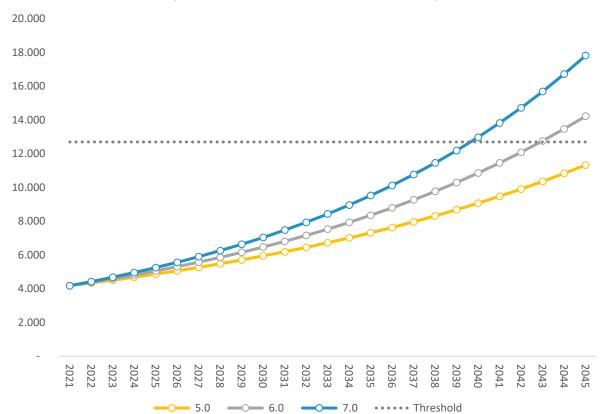
Visi 2045: Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi dan Pusat Peradaban Maritim Dunia



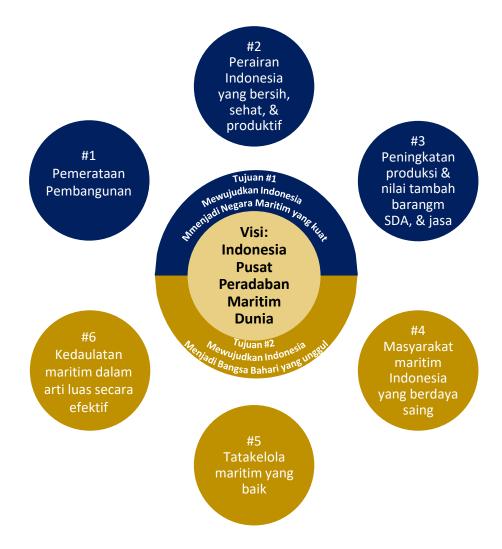
Untuk dapat menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%

Simulasi GNI Per Capita

(USD Constant 2021, Atlas Method)

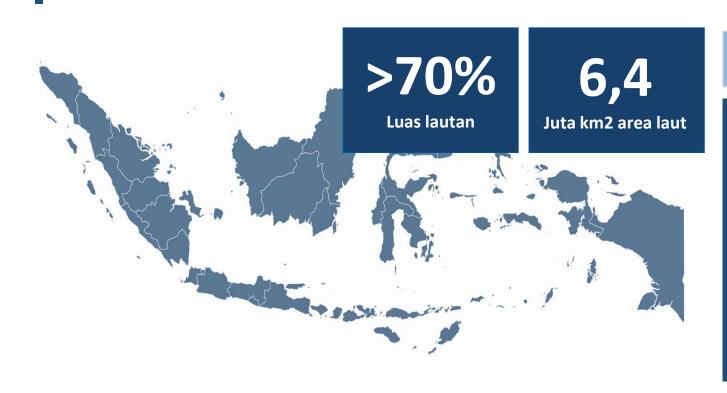


Halauan Maritim Nasional 2045



Indonesia adalah Negara Kepulauan Terbesar di Dunia dengan Potensi Sumber Daya Kelautan yang Besar





Negara kepulauan terbesar dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia





17.500 pulau dengan garis pantai +108.000 km

Populasi 278 juta orang



Terletak di sepanjang jalur laut utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania

Kaya akan keanekaragaman hayati laut dan potensi sumber daya laut



Produsen terbesar ke-2 pada Perikanan Tangkap dan Budidaya (global share: 8% fishery; 12% Aquaculture)



Sumber daya perikanan mencakup 37% spesies di seluruh dunia



Produsen rumput laut terbesar ke-2 di dunia (28% output global)



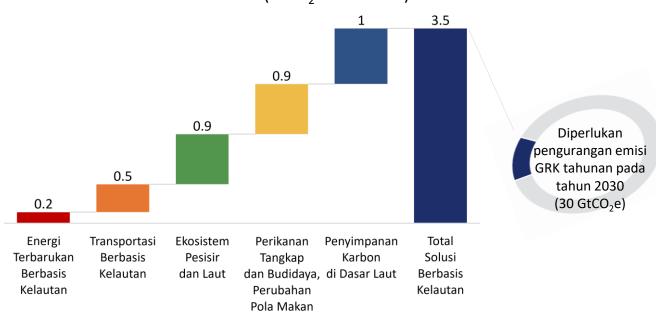
Kontribusi terhadap PDB mencapai USD 33 Miliar (2.77% PDB pada 2021)

Ekonomi Biru Juga Akan Berkontribusi Terhadap Mitigasi Dampak Perubahan Iklim



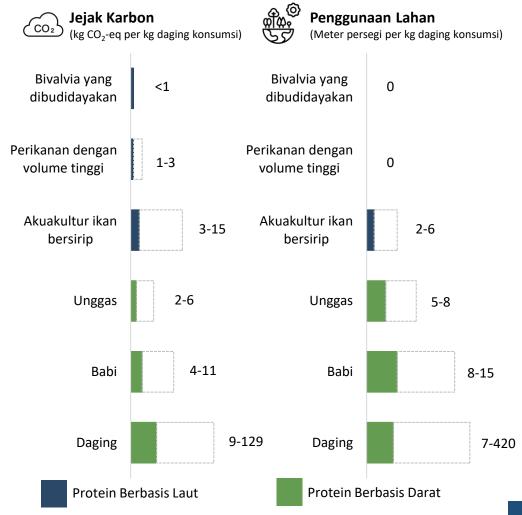


Kontribusi Lima Area Berbasis Laut untuk Mitigasi Perubahan Iklim pada 2030 (GtCo₂e Maksimal)



^{*)} Untuk tetap berada di bawah perubahan 1,5°C relatif terhadap tingkat pra-industri Sumber: Hoegh-Guldberg, O., et al. 2019.

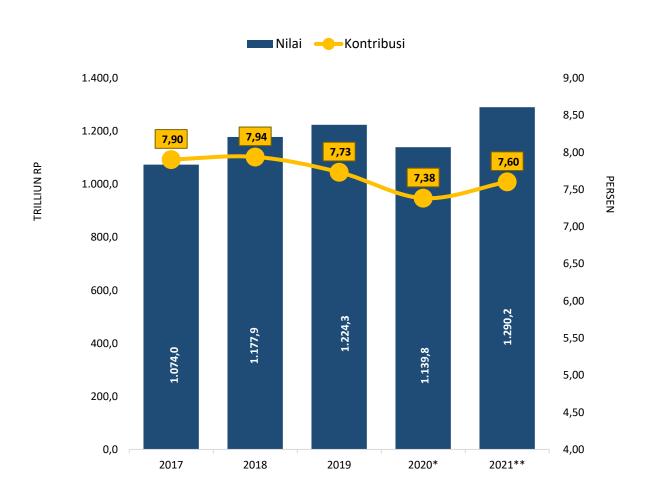
Penggunaan Lahan dan Implikasi Karbon: Perbandingan antara Sumber Protein Berbasis Laut dan Berbasis Darat



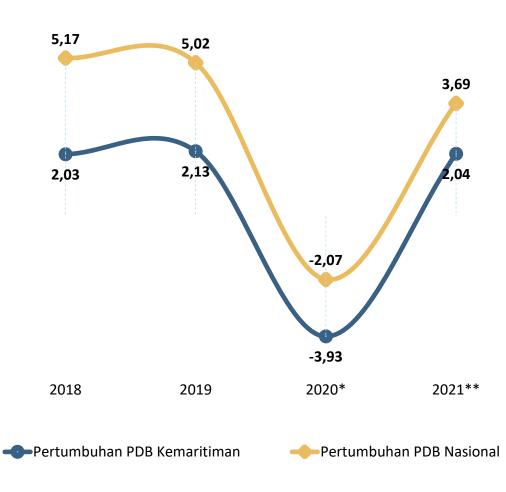
Namun Permasalahannya Kontribusi Ekonomi Biru Masih Perlu Ditingkatkan



Kontribusi PDB Kemaritiman masih terbatas



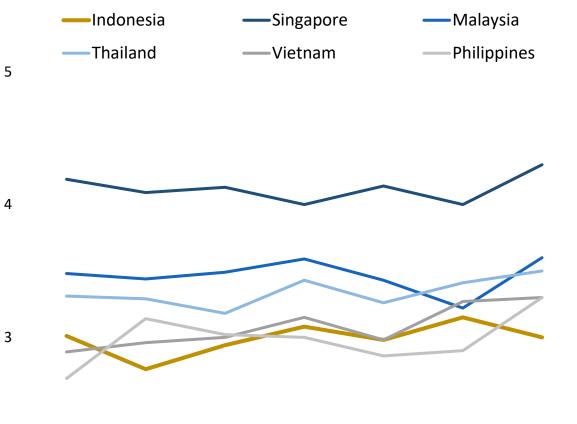
Dengan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB Nasional



Kinerja Logistik dan Konektivitas Maritim Indonesia Masih Tertinggal Dibandingkan Negara Lain

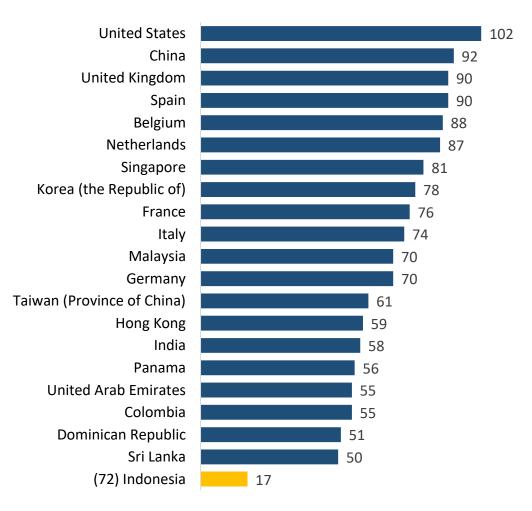


Indeks Kinerja Logistik di Negara-Negara ASEAN





Konektivitas Maritim (Jumlah Negara Partner)

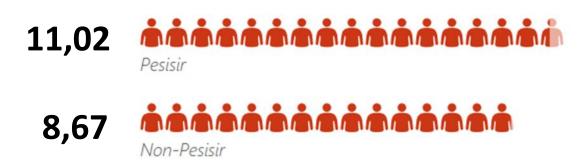


Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Pesisir Juga Masih Lebih Buruk dibandingkan dengan Non Pesisir

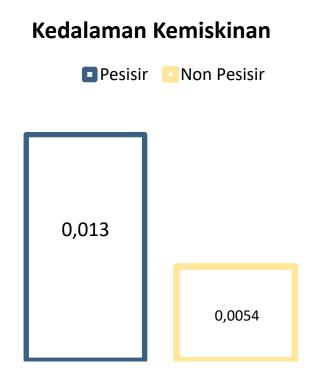


... Penduduk di daerah pesisir relatif lebih miskin, dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih buruk

Persentase Penduduk Miskin

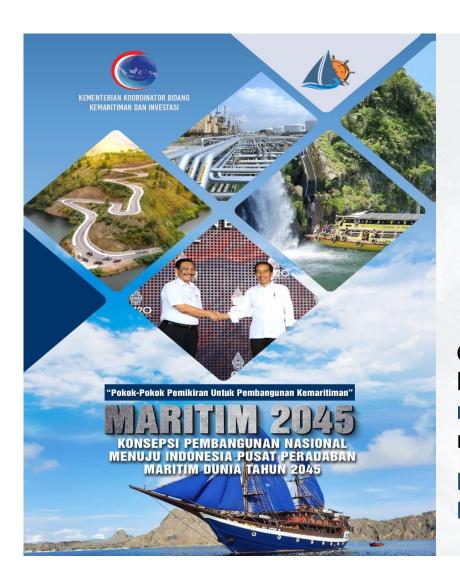


Sumber: Perhitungan sendiri menurut SUSENAS Maret 2021 *garis kemiskinan provinsi 2021 menurut BPS



Pokok-Pokok Pemikiran Pembangunan Kemaritiman sebagai Masukan Konsep Pembangunan Nasional yang dituangkan kedalam RPJPN 2025-2045





Visi Maritim 2045:

"Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia"

Misi Maritim 2045:

"Menyelenggarakan Pembangunan Nasional Berbasis Kemaritiman"

Gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia harus dimaknai dengan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di era nenek moyang kita.

Kembali ke kejayaan masa lalu sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia.

9 Agenda Pembangunan Maritim 2045



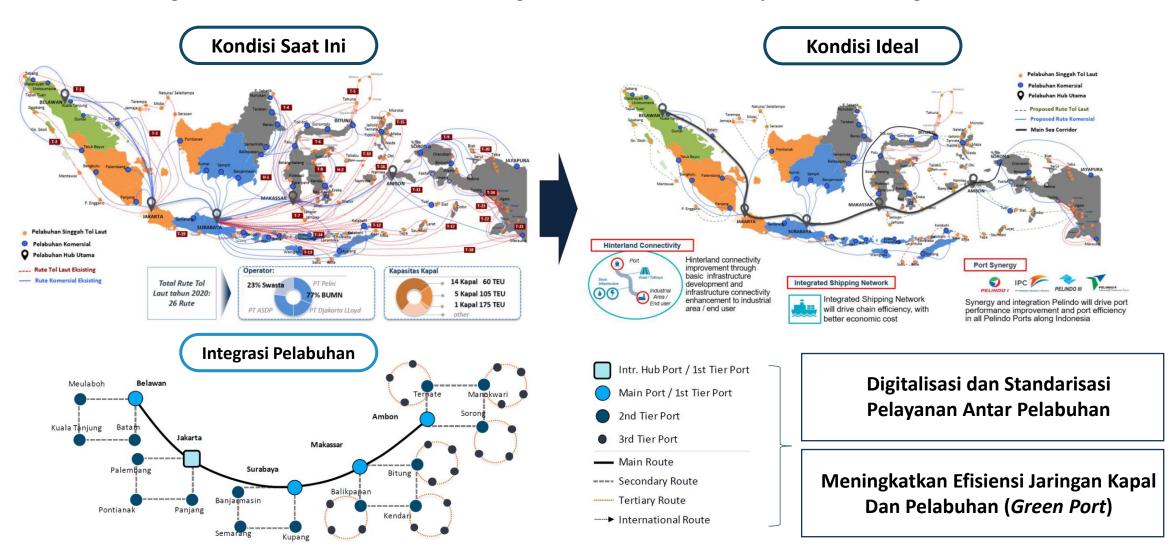
Agenda 01:
Pengembangan Sarana Prasarana Maritim



Agenda 1: Pengembangan Sarana dan Prasarana Maritim



Peningkatan Efisiensi Pelabuhan Melalui Integrasi Pelabuhan dan Penerapan Ekosistem Logistik Nasional

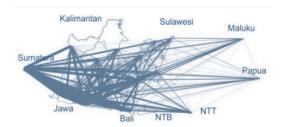


Agenda 2: Peningkatan Konektivitas Maritim



Tol Laut: Tol Laut Bersubsidi dan Tol Laut "Backbone" & Pusat Peradaban Maritim: Pusat Konektivitas Maritim Dunia

Kondisi Pelabuhan Utama



Kondisi Eksisting

- Pelayanan pelabuhan* belum optimal dan penilaian kerja sulit dilaksanakan
- Infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar
- Volume muatan rendah tidak terkait dengan kawasan ekonomi & belum terbentuk konsolidasi rute (loop) secara optimal (hanya 23%)

Saat ini

Pengembangan Pelabuhan Simpul Peti Kemas (Tol Laut "Backbone")



Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

- Terwujudnya standardisasi pola operasional dan infrastruktur pelabuhan di pelabuhan simpul
- Aktivasi jalur tol laut backbone dan penggunaan kapal berkapasitas lebih besar (2500 TEUs)
- Terwujudnya peningkatan muatan dan integrasi hinterland dengan pelabuhan

Fokus 2020-2024

Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional



Hub Internasional

- Konsolidasi kargo domestik dan internasional dengan kapal ukuran 10.000 TEUs
- pelabuhan utama didorong untuk memenuhi standar hub internasional
- Direct call hanya bisa dilakukan pada pelabuhan yang memenuhi standar hub internasional

Pusat Peradaban Maritim Dunia



Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai pusat konektivitas maritim dunia

Pencapaian tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan prasyarat berupa konektivitas jalur pelayaran Indonesia secara nasional dan internasional

>10 tahun

*Jenis Pelabuhan: Utama (28), Pengumpul (164) & Pengumpan (Regional: 166, Lokal: 278)

TOL LAUT BERSUBSIDI

Masih tingginya disparitas harga terutama di kawasan timur

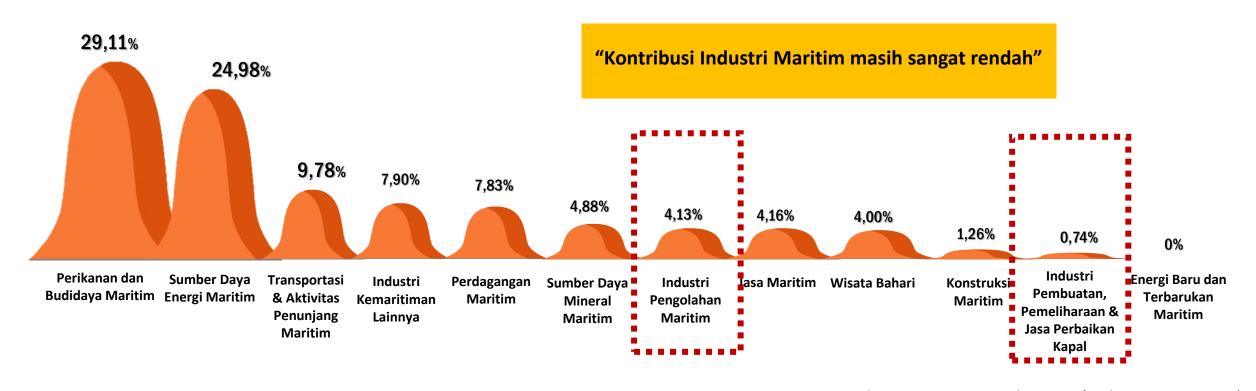


Program Tol Laut Bersubsidi tahun 2022 mencapai 33 rute

>5 tahun

Agenda 3: Pengembangan Industri Maritim – Hilirisasi Sumber Daya Maritim



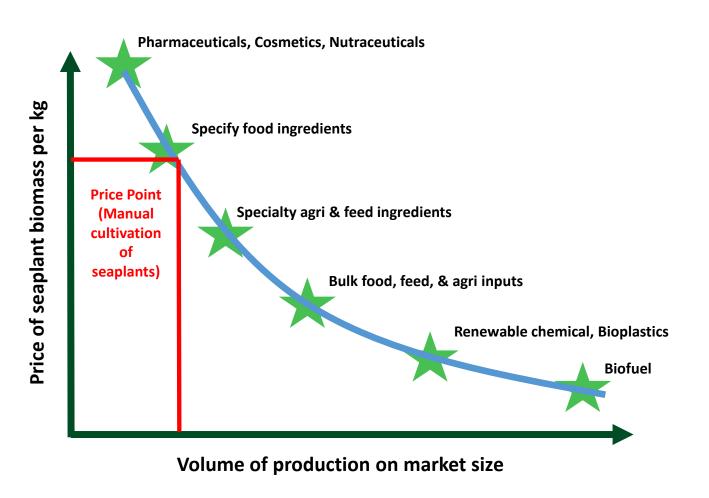


Sumber: Estimasi BPS, Kemenko Marves (Angka Sangat Sementara)

Agenda 3: Pengembangan Industri Maritim – Hilirisasi Rumput Laut



Untuk dapat melakukan hilirisasi rumput laut, perlu dilakukan pengurangan biaya produksi budidaya dan pengolahan rumput laut



Melalui budidaya skala besar dan penggunaan teknologi/mekanisasi



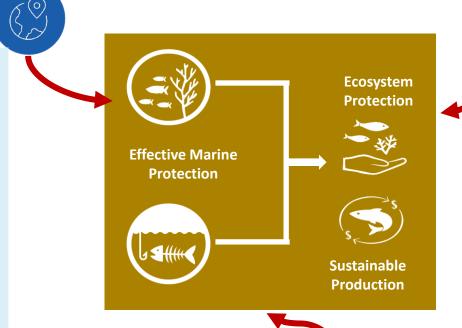


Agenda 4: Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan Perairan



Kawasan Konservasi Perairan

- Kawasan konservasi perairan masih kekurangan sumber daya dan pendanaan
- Efektivitas manajemen di berbagai level
- Pemantauan dan cakupan penegakan yang kurang memadai
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan mencapai 32,5 juta Ha (10% dari luas laut) pada 2030 sesuai dengan target SDG 14 (Life Under Water)



Irisan

Perikanan Tangkap

- Dari 99 Stok Ikan di Indonesia,
 35 over-exploited dan 42 fully-exploited
- Diperlukan science based untuk meningkatkan penilaian stok ikan
- Peluang reformasi pengelolaan perikanan tangkap → kohesi kebijakan

- Perubahan iklim → temperatur dan keasaman laut
- Pengembangan pesisir → risiko terhadap sumber daya perairan
- Peningkatan polusi laut

Agenda 5: Penguatan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan Maritim



Realignment Flight Information Region (FIR), Defence Cooperation Agreement, dan Extradition Treaty





2 Decommisioning Anjungan Migas





Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar



4 Penanganan Kecelakaan Navigasi Maritim





Agenda 6: Penguatan Diplomasi Maritim



Penguatan Kerja Sama di Bidang Kemaritiman



Jumlah Kerja Sama Luar Negeri Bidang Kemaritiman (2015-2023)

Memimpin Gerakan Global Bidang Kemaritiman

1. Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum)



2. Emerging Economis Cooperation







Agenda 7: **Penguatan Tata Kelola Maritim**



Visi Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia

"Menjadikan Indonesia sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional."



Turunan dari UU Kelautan (No.32/2014)

PERPRES NO 16 TAHUN 2017 7 PILAR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (KKI)

Pengelolaan SDA dan SDM



Lingkungan Laut

Kesejahteraan

PERPRES NO 34 TAHUN 2022 tentang RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (KKI) TAHAP II TAHUN 2021-2025

Agenda 8: Pemajuan Budaya dan Karakter Bangsa Bahari



Agenda: Revolusi Mental & Pembangunan Budaya

Program Budaya Bahari dan Literasi Maritim Framework Gerakan Literasi-Aksi-Inovasi

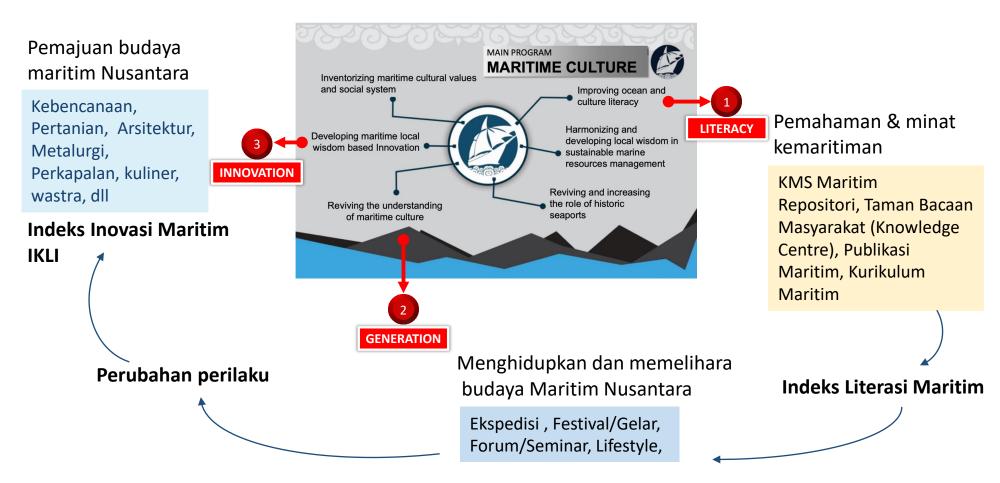


Strategi

Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Program

Pengembangan Budaya Maritim dan Literasi Kelautan, ...memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat

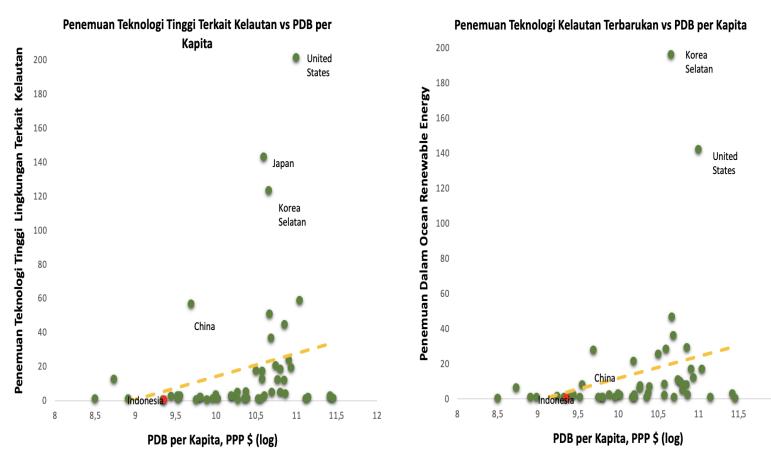


Membangun pusat inovasi yang menggabungkan teknologi modern dengan pengetahuan budaya melalui sinergi antara pelaku budaya dan pengembang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 9: Pengembangan Iptek dan SDM Maritim

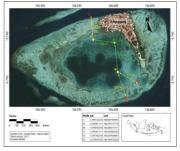


Peran Iptek untuk Mencapai Visi Maritim: Negara-Negara Maju di Dunia Memanfaatkan Potensi Kelautan Melalui Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



IPTEK Kemaritiman Saat Ini - 2045:

- 1. Jejaring (networks) Observasi Sistem Fisik-Siber (cyber physical system
- 2. Wahana Otomatis/otonom, Tak Berawak, dan Robotika (autonomous, unmanned, robotics)
- 3. Big Data Kemaritiman [integrasi, sintesis berbagai ragam dan jenis data] dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk identifikasi, klasifikasi dan kuantifikasi obyek dan proses bawahair

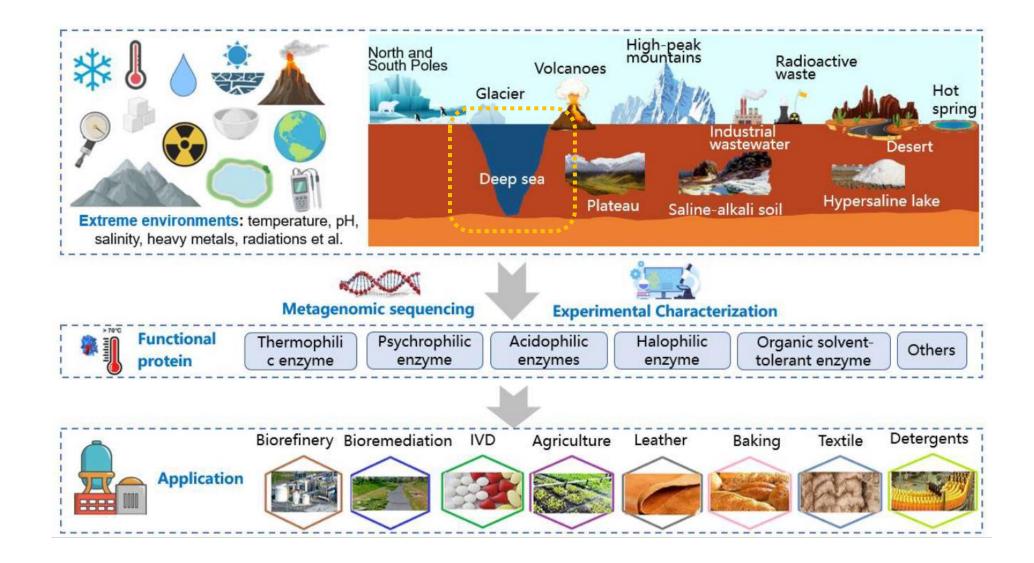


Penyiapan SDM Unggul 2045:

- 1. Literasi Maritim (*Ocean Literacy*), selain Literasi Data dan ICT, Literasi Teknologi, serta Literasi Manusia dan Budaya;
- 2. Transformasi Digital di Bidang Pendidikan (*Digital Transformation in Education*)
- Peningkatan keterampilan (Upskilling)
- 4. Penyesuaian Keterampilan Baru (Re-skilling)
- 5. Penguatan dan Pengembangan Keterampilan Abad 21 (21st Centery Skill Set): Literasi, Kompetensi, dan Kualitas Karakter

Eksplorasi Laut: Contoh Aplikasi untuk Riset Laut Dalam





Peta Alur Maritim 2045

Peta Alur HM'2045 merupakan tahapan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kemaritiman 2045 melalui 3 Strategi, 9 Agenda dan 25 Inisiatif Strategi/ Program Prioritas Pembangunan

Renaksi KKI II & Nat. Ocean Assessment



Memantapkan Indonesia menjadi negara maritim yang KUAT melalui strategi utama pengembangan ekonomi maritim mencakup peguatan sarana prasarana & konektivitas maritim, pengelolaan SDA & lingkungan perairan, dan industri maritim, serta menyelenggarakan penataan strategi peningkatan daya saing bangsa dan ketahanan maritim



Membangun Indonesia sebagai bangsa bahari yang MAJU melalui strategi utama peningkatan daya saing bangsa meliputi pemajuan budaya & karekter bangsa bahari, dan pengembangan Iptek & SDM maritim, serta terus memperkuat pembangunan ekonomi maritim dan memantapkan penataan strategi peningkatan ketahanan maritim



Membangun Indonesia menjadi negara maritim yang MANDIRI melalui strategi utama penguatan ketahanan maritim melalui penguatan Hankam & keselamatan, diplomasi & okupasi dan tata Kelola maritim, serta terus memperkuat pembangunan ekonomi maritim dan peningkatan daya saing bangsa



Indonesia yang inovatif,

nusantara

berdayasaing, berdaulat dan

mandiri, serta berkarakter

2020-2024 **Baseline/Map HMN**

2025-2029 Indonesia Kuat 2030-2034 Indonesia Maju 2035-2039 Indonesia Mandiri 2040-2044 Indonesia PMD

(Peradaban Maritim Dunia)

National Blue Agenda Action Partnership



BLUE GROWTH

Inclusive and Sustainable Economic Development



Blue Health

konservasi biru dan keanekaragaman hayati, restorasi, pengelolaan ekosistem, perencanaan tata ruang pesisir, dll



Blue Food

produksi, konsumsi, budidaya, penetrasi pasar dan akses rantai pasokan, sistem ketahanan pangan, produsen skala kecil, keberlanjutan dan sertifikasi daya saing produk, dan investasi, dll



Blue Innovations

sains, teknologi, e-aplikasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, pekerjaan, mata pencaharian, dll



Blue Finance

pembiayaan kreatif, pembayaran jasa ekosistem blue economy, blue bond, blue sukuk, inkubasi/start-up, dll





Menjaga NKRI melalui Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982

dan Hukum Internasional







Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.

Guru Besar Hukum Internasional Univ. Indonesia Rektor Univ. Jenderal Achmad Yani



SALAH SATU UPAYA MENJAGA ADALAH MENGARSIPKAN



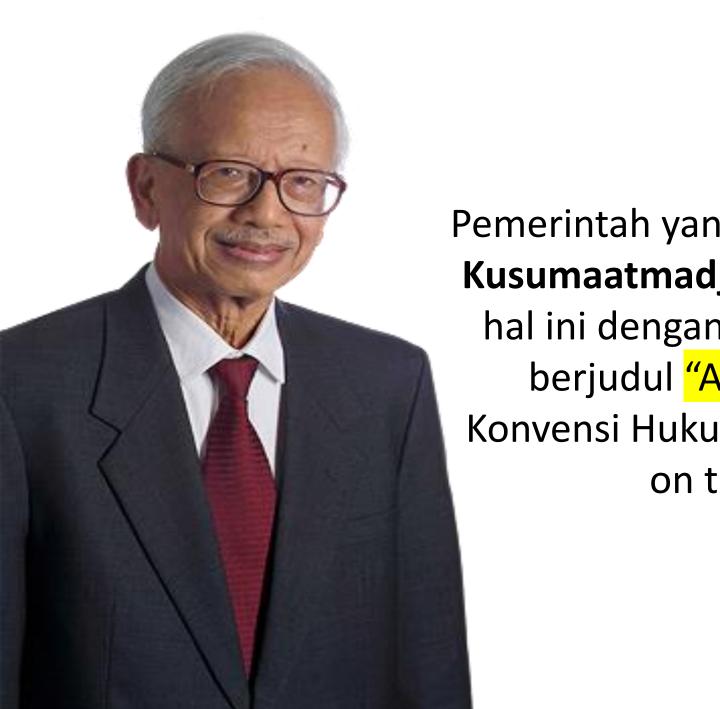
Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai konferensi internasional dan berbagai perundingan multilateral sejak Deklarasi Juanda 1957 untuk pembentukan Konvensi Hukum Laut 1982



Indonesia memiliki kepentingan mengingat Deklarasi Juanda terkait Negara Kepulauan merupakan pernyataan sepihak yang tidak diakui oleh masyarakat internasional



Pemerintah saat itu memperjuangkan agar Negara Kepulauan diterima oleh masyarakat internasional melalui suatu Perjanjian Internasional



Pemerintah yang dipimpin oleh **Prof Mochtar Kusumaatmadja** telah **BERHASIL** melakukan hal ini dengan dimasukkan Bagian IV yang berjudul "Archipelagic States" dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UN Convention on the Law of the Sea)

Proses panjang penyampaian ide dan berbagai perundingan perlu diarsipkan



2. Arsip digunakan sebagai bukti bila sengketa muncul dan berujung di Lembaga peradilan

memiliki berbagai dokumen terkait formulasi pasal

- 3. Para negosiator Indonesia memahami ruh dari formulai pasal sehingga mereka tidak terkecoh dengan narasi negosiator negara tetangga
- 4. Agar generasi muda yang tidak turut dalam perundingan memahami secara baik dibuatnya berbagai ketentuan



APA YANG PERLU DIARSIPKAN DAN DIMANA?



- Dokumen yang perlu diarsipkan adalah:
 - Naskah coretan dari para pemikir tentang Negara Kepulauan apakah dalam bentuk tulisan kecil ataupun disertasi
 - Position paper dari pemerintah Indonesia terkait Negara Kepulauan
 - Naskah-naskah pedoman delegasi RI saat melakukan perundingan
 - Berbagai perdebatan dalam pembahasan antar negara dalam terbentukan Konvensi Hukum Laut 1982
 - Berbagai tulisan yang ada dalam makalah, jurnal, buku bahkan biografi dan otobiografi para pemikir dan perunding Konvensi Hukum Laut 1982
- Pengarsipan utama harus berada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), disamping di Kementerian Luar Negeri atau Kementerian/Lembaga yang berkaitan









Sains Kelautan Untuk Pembangunan Kemaritiman;

(Penguatan Arsip Nasional Bidang Kemaritiman)

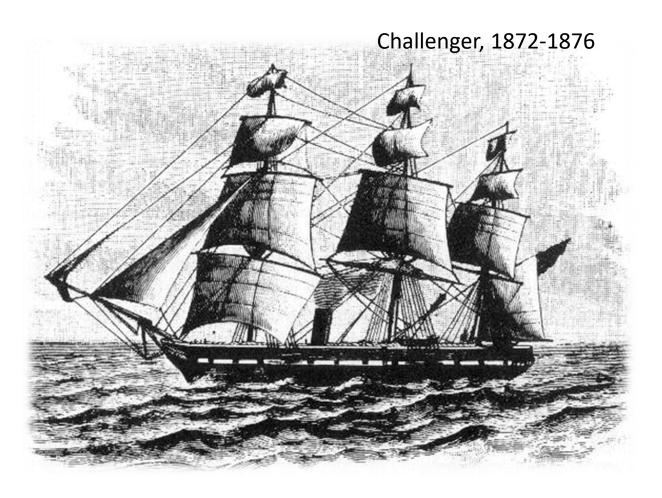
Augy Syahailatua Pusat Riset Oseanografi – BRIN

Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip kemaritiman Jakarta, 12 Juni 2023



Pokok Bahasan

- Perkembangan Sains Kelautan di Indonesia
- Pendokumentasian Sains Kelautan: Kemajuan dan Tantangan
- Bagaimana StrategiPenguatan Arsip SainsKelautan













Program UNESCO: The Decade of Ocean Science, 2021-2030

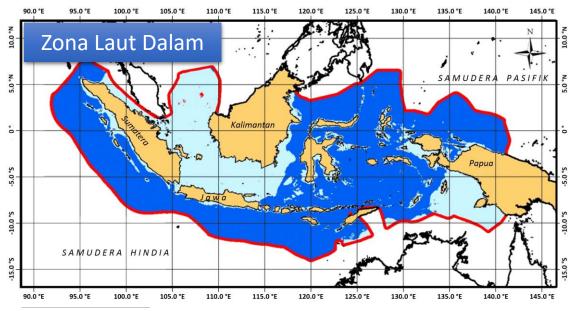
- Vision: 'the science we need for the ocean we want'
- Mission: Transformative ocean science solutions for sustainable development, connecting people and our ocean
- Outcomes:
 - A clean ocean
 - A healthy and resilient ocean
 - A productive ocean

- A predicted ocean
- A safe ocean
- A accessible ocean
- An inspiring and engaging ocean

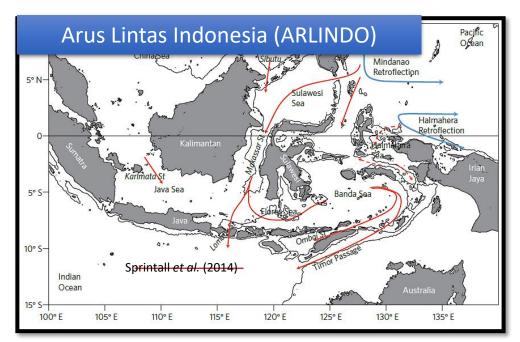
Sumber: https://www.unesco.org/en/decades/ocean-decade

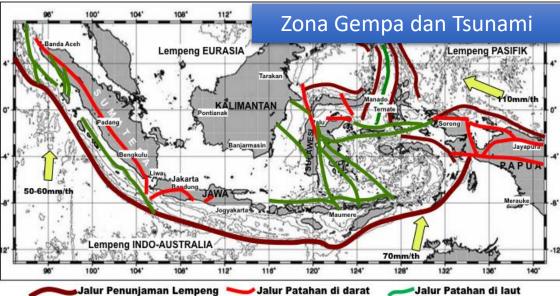


Indonesia









Lee & Lawver, 1995; Sapile et al, 1999; Hall & Wilson 2000; Avouac, 2005; Natawidjaja, 2007; Dotsea, 2005; GMT map v4.3



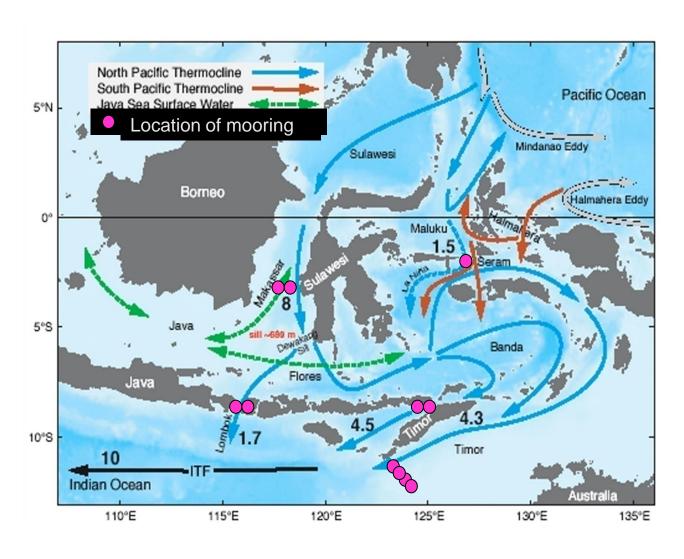
Ekspedisi Laut di Nusantara

No.	Ekspedisi	Periode
1.	Challenger	1872-1876
2.	Gazelle	1875
3.	Valdivia	1898-1899
4.	Siboga	1989-1990
5.	Vening-Meinesz	1927-1929
6.	Snellius I & II	1929-1930 & 1984-1985
7.	Galathea	1950-1952
8.	Alpha-Helix	1975 & 1979
9.	SEATAR	1966-1980
10.	CORIDON	1980-1981
11.	Karubar	1991
12.	Indeks Satal	2010





Observasi "Arus Lintas Indonesia"

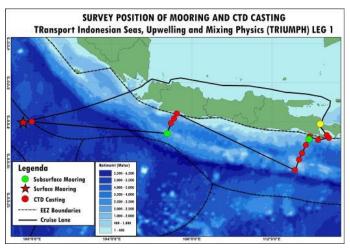


- ARLINDO MIXING (1993)
- ARLINDO CIRCULATION (1996 & 1998)
- "INTERNATIONAL NUSANTARA STRATIFICATION AND TRANSPORT" (INSTANT): 2003 – 2007



TRIUMPH Expedition, Okt 2018

(Transport Indonesia Sea, Upwelling and Mixing Physics)















Kerjasama: China, US dan Indonesia



South Java Deep-Sea Exp., Mar 2018













Kerjasama: Singapore dan Indonesia(@SJADSE2018)



Ekspedisi Jala Citra: 2021-2023

Koordinator: Pushidros TNI AL

- Ekspedisi Jala Citra,
 2021: Indonesia Timur
- Ekspedisi Jala Citra II,
 2022: Laut Banda
- Ekspedisi Jala Citra III,
 2023: Laut Fores





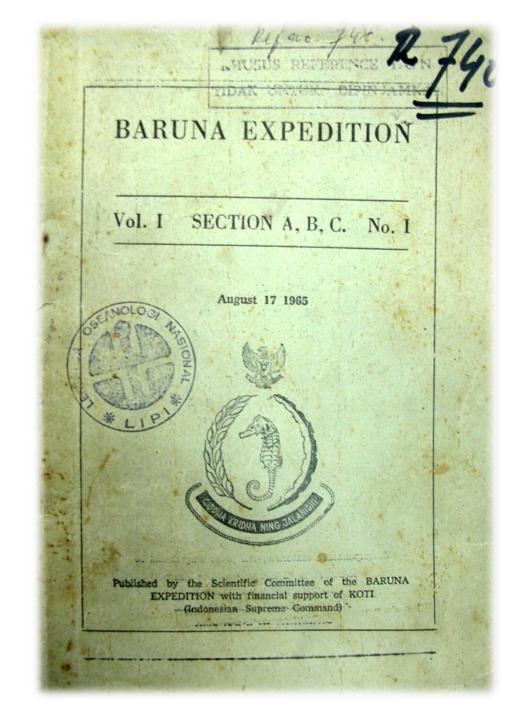
Pendokumentasian Sains Kelautan: Kemajuan dan Tantangan



Ekspedisi "BARUNA I" (1964)

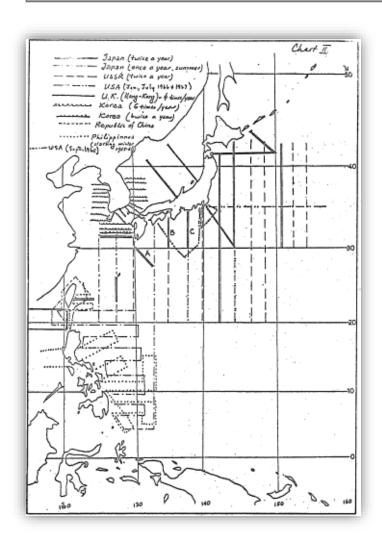


Ekspedisi oseanografi pertama yang dikoordinasi secara nasional dengan tiga kapal: "RI Jalanidhi", "KM Djadajat" dan "RI Tamrau". Kegiatan di Kawasan Indonesia bagian Timur, 9 Mei – 27 Juli 1964





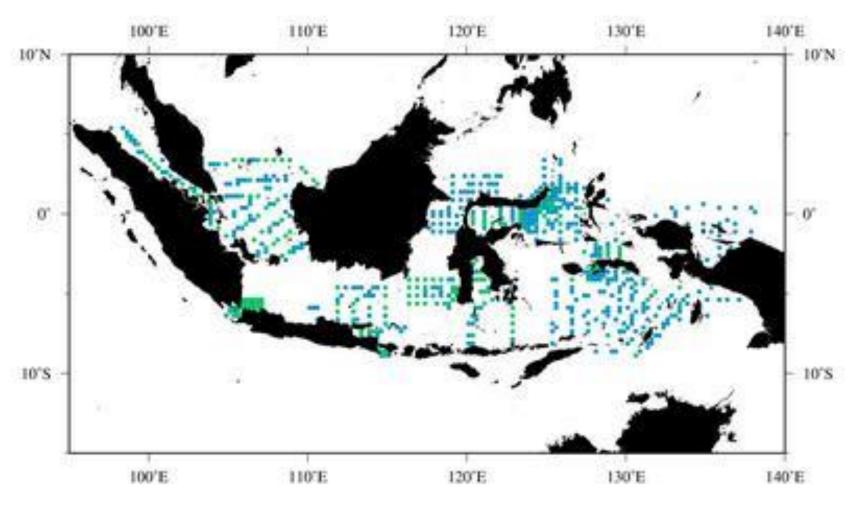
Cooperative Study of Kuroshio, 1965 -1979



- Indonesia berpartisipasi dalam program CSK-1, 1965-1979
- Data dan informasi dari CSK-1, tersimpan di sistim repositori JAMSTEC, Japan (https://ioc-westpac.org/csk2/csk-1-data/)
- Mulyadi HA, **Syahailatua A**, Arifin Z. 2019. The Co-operative Study of Kuroshio (CSK): Is it beneficial for Indonesia? Marine Research in Indonesia, 2019; 44(2):63-71.



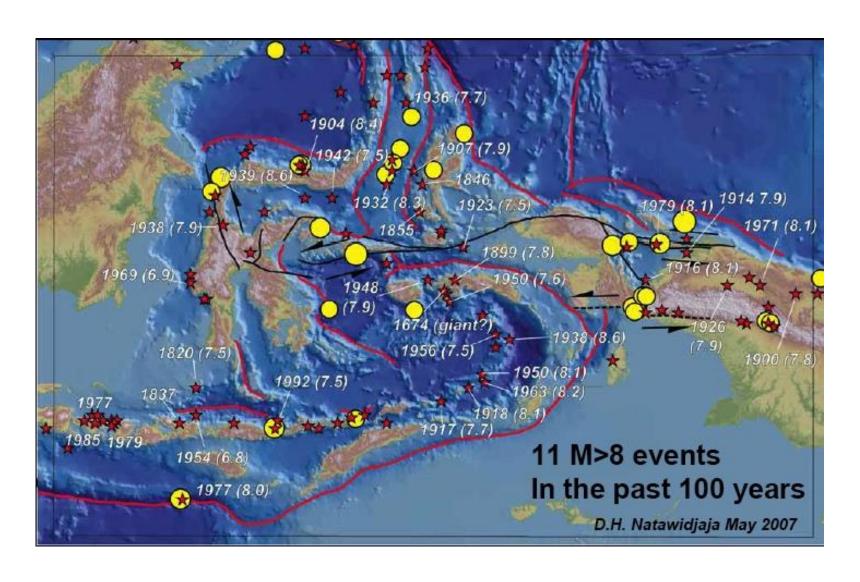
Survei Oseanografi KR "SAMUDERA" 1973-1983



Sumber: http://www.st.nmfs.gov/plankton/search/cruisesub_s.html#42SA

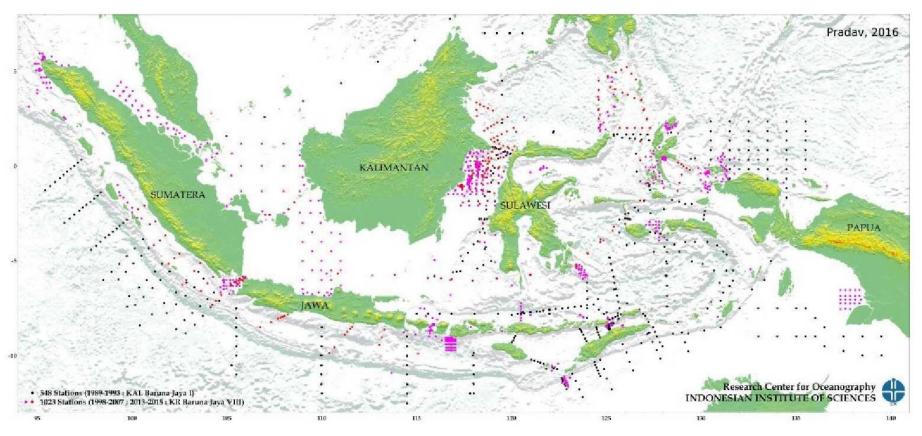


Sejarah gempa bumi sejak tahun 1600 (USGS)





Ekspedisi Widya Nusantara (E-WiN):2007-2015



Lokasi sampling pada pelayaran menggunakan KR Baruna Jaya I dan VIII, termasuk pelayaran E-WiN 2007-2015 (P. Avianto, 2016)

Sumber: Wahyudi et al., 2016)



Beberapa Pusat Data Kelautan di Indonesia

National Oceanography Data Centre (NODC):

Kemenkomarves / BPPT

Pusat Meteorologi Maritim

BMKG

Pusat Data Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi

Pushidrosal TNI - AL

Pusat Data Geologi Kelautan

BBSGL – Badan Geologi KESDM

Pusat Data Oseanografi

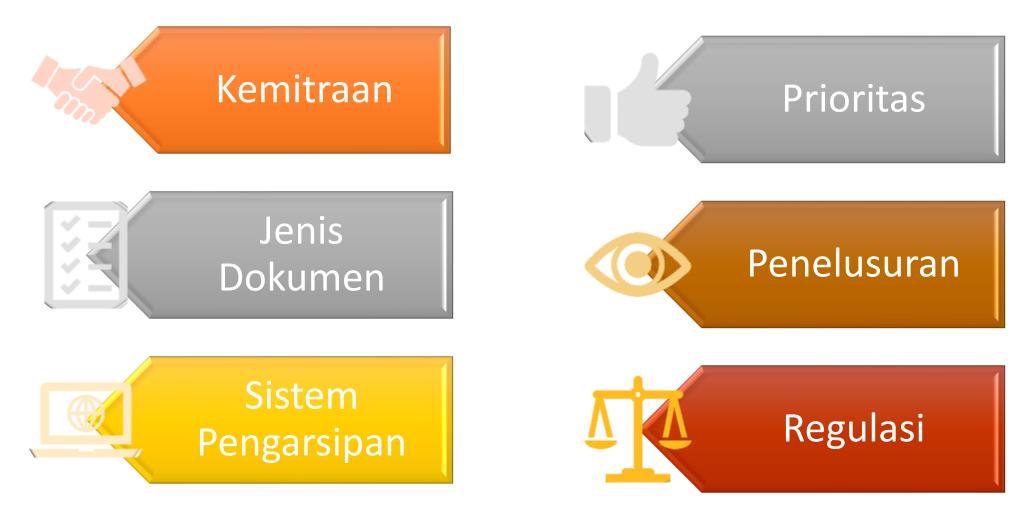
• PR Oseanografi - BRIN

Pusat Data Kelautan

Kementerian KP



Strategi Penguatan Arsip Kemaritiman





Ringkasan

- Penguatan arsip nasional bidang kemaritiman bukan saja urgensi nasional, tetapi juga merupakan urgensi global;
- Pengarsipan hasil sains kelautan / kemaritiman dapat mengindikasi peradaban suatu bangsa; dan sangat bermanfaat bagi pengembangan sains & teknologi ke depan;
- Pendokumentasian sains (& teknologi) kelautan nasional sudah dimulai, namun bersifat sporadik dan eksklusif, belum terpusat secara baik;
- Diperlukan kriteria tertentu untuk hasil sains dan teknologi kelautan dapat menjadi arsip nasional (seperti temuan terbaru, paten, penamaan biota laut tertentu, dll)





Terima kasih

MEMBANGUN BUDAYA MARITIM BERBASIS ARSIP

STUDI KASUS: BENTANG MARITIM KERAJAAN GOWA 1520-1669

Mukhlis PaEni, Jakarta 2023

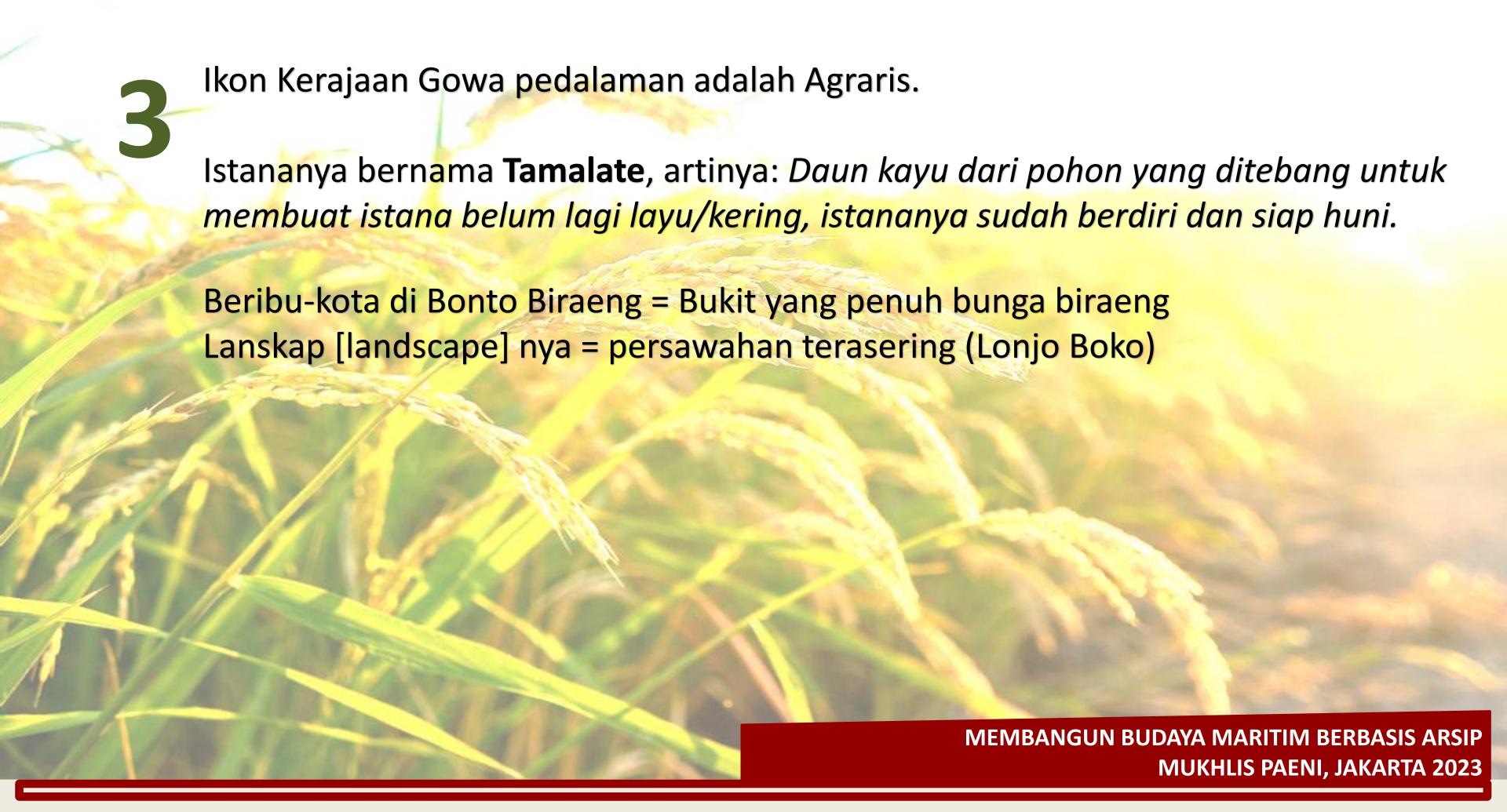


PADA TAHUN 1520-1530 RAJA GOWA KARAENG TUMAPARISI KALONNA, MEMINDAHKAN IBUKOTA KERAJAAN GOWA DI PEDALAMAN DAN MEMBANGUN IBUKOTA KERAJAAN BARU DI PESISIR PANTAI.



la meninggalkan istananya di pedalaman yang bernama **Tamalate.** Kemudian membangun sebuah istana baru yang bernama **Maccini Sombala** dan satu lagi bernama **Maccini Danggang (**yang dibangun oleh raja berikutnya.)







Istana Maccini Sombala dan Maccini Danggang

Maccini = melihat, memandang

Sombala = layar

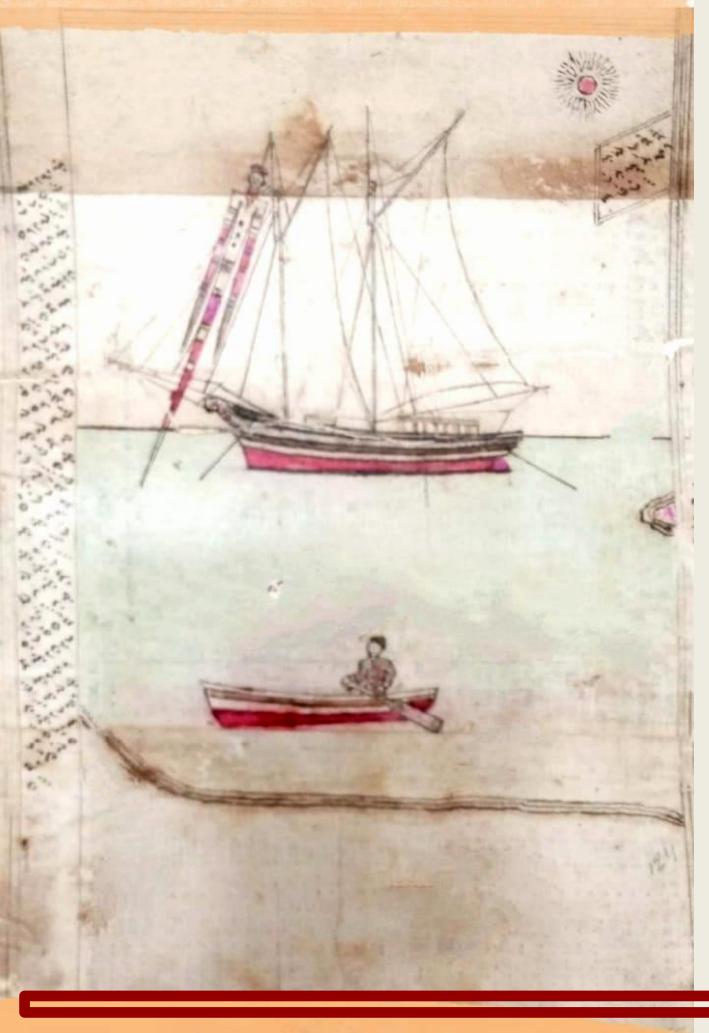
Maccini Sombala = Memandang layar

Maccini Danggang= Memandang perahu para pedagang



MEMBANGUN BUDAYA MARITIM BERBASIS ARSIP MUKHLIS PAENI, JAKARTA 2023







Pemandangan ke depan berupa perubahan ikon dari agraris ke maritim diikuti dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang menjadi pendukung utama sebuah ibukota maritim dari sebuah kerajaan.

- a. Pengangkatan Syahbandar.
- b. Pengangkatan juru tulis istana yang menguasai bahasa internasional.
- c. Pembangunan benteng-benteng, pengawal dan penjaga pantai.
- d. Pembangunan infrastruktur dermaga, pasar dan gudang.
- e. Penyesuaian alat bayar dan timbangan atau ukuran.
- f. Pembangunan kawasan internasional untuk para pendatang lokal dan asing dan tata kota (peran Portugis)
- g. Pengadaan alutsista (meriam dan kanon) yang ditempatkan di benteng-benteng kerajaan.
- h. Menciptakan tata protokoler tamu yang akan menghadap Raja dan menjalin kerjasama dengan tingkat-tingkat hubungan diplomasi, dan lain-lain.

MEMBANGUN BUDAYA MARITIM BERBASIS ARSIP MUKHLIS PAENI, JAKARTA 2023

Kejayaan Kerajaan Gowa berlangsung dari jaman Raja Gowa ke-IX Karaeng Tumaparisi Kallonna (tahun 1520) hingga zaman Raja Gowa ke-XVI Sultan Hasanuddin (tahun 1669) selama 149 tahun atau hampir satu setengah abad.

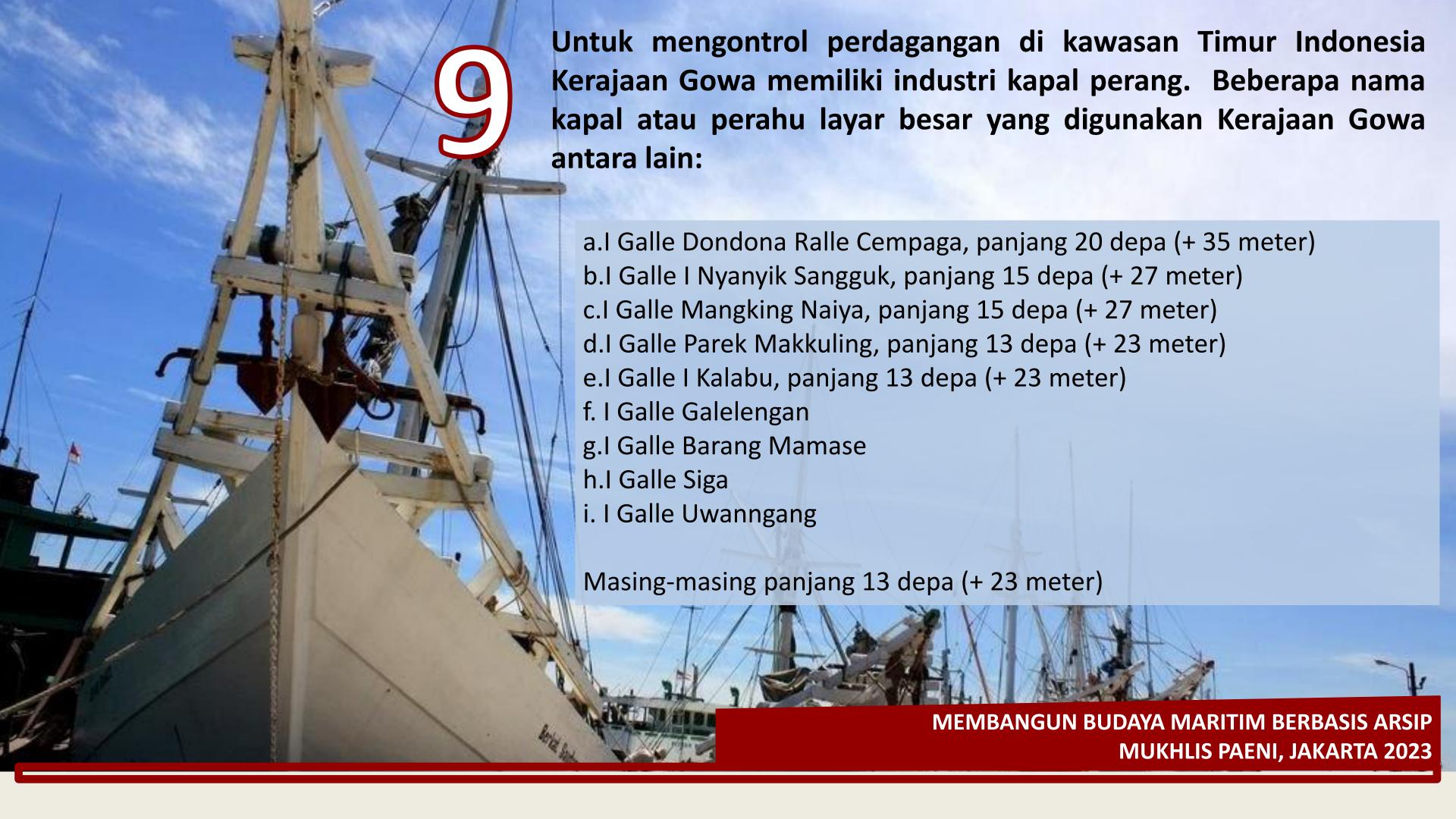
Di Era itulah puncak kejayaan sebuah kerajaan maritim di Nusantara yang ditopang oleh sebuah kebudayaan besar maritim (maritim's great tradition). Dalam sebuah tradisi besar kemaritiman, ditemukan adanya filsafat kemaritiman, tradisi kemaritiman, nyanyian laut, undang-undang kelautan (kemaritiman), mitologi kelautan, astronomi & astrologi kelautan, bermacam-macam permainan dan olahraga, arsitektur kelautan (shipping building), seni, arsitektural benteng-benteng pertahanan pantai, pengaturan komoditas laut, rute pelayaran, etika peperangan di laut (termasuk rampasan perang, harta dan manusia).



- Ayuthia (Siam) 1450-1469 (Kota Dagang) 1620-1688
- Pegu (1472-1581)
- Malaka (1480-1511)
- Aceh (1570-1670)
- Banten (1600-1680)
- Somba Opu (1548-1669)



MUKHLIS PAENI, JAKARTA 2023



Ketika VOC Belanda datang, Ia menghadapi sebuah realitas bahwa bila ingin menguasai perdagangan di Nusantara khususnya di kawasan Timur Indonesia yang menjadi pusat mata dagang rempah (pala dan cengkeh) serta hasil laut, maka VOC harus menyelesaikan sebuah pekerjaan besar:

- 1. VOC harus menguasai atau menaklukkan kerajaan Gowa dan menutup semua mata rantai perdagangan asing di Somba Opu dan mengusir semua orang asing yang ada di Somba Opu terutama Portugis.
- 2. Kemaritiman yang menjadi tiang penyangga perekonomian harus dimatikan dan seluruh aktivitas masyarakatnya yang bertumpu ke laut demikian juga berbagai kebiasaan dan tradisi nya yang berhubungan dengan laut harus dilarang dan dialihkan ke darat sebagai petani.

Untuk mewujudkan ambisinya ini VOC harus membayar mahal dengan berbagai cara dengan mewujudkannya melalui Perang Makassar tahun 1666 - 1667-1669.

Perang Makassar tercatat sebagai sebuah perang laut terbesar sepanjang sejarah VOC. Perang tersebut berakhir dengan ditandai ditandatanganinya Perjanjian Bungaya tahun 1667 yang kemudian diperbarui tahun 1669 dan setelah itu direvisi lagi, sampai beberapa kali. Beberapa isi perjanjian yang penting antara lain:

- 1. Orang Bajao bukan lagi Rakyat Gowa tapi menjadi rakyat VOC.
- 2. Raja Gowa harus mengusir orang orang Portugis dari Makassar.
- 3. Raja Gowa memerintahkan rakyatnya pindah dari pesisir pantai ke pedalaman sejauh 10 mil.
- 4. Raja Gowa harus melarang rakyatnya mencari nafkah di laut dan menyuruhnya menjadi petani dan menanam kacang-kacangan.
- 5. Rakyat Gowa hanya boleh berlayar ke daerah-daerah yang diizinkan oleh VOC dan jika berlayar ke daerah lainnya harus seizin VOC dan diwajibkan memiliki PAS atau izin berlayar.
- 6. Tonase kapal harus diturunkan tidak boleh melampaui 50 ton kemudian 30 ton kemudian 10 ton.
- 7. Sejak saat itulah kita telah kehilangan sebuah tradisi besar kemaritiman atau kebudayaan maritim. Dan yang abadi hingga kini adalah masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan yang sesungguhnya itulah yang abadi dari dulu hingga kini (kemiskinan)
- 8. Dengarlah nyanyian abadi nelayan miskin pesisir.



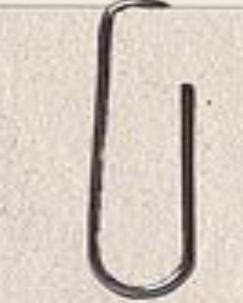
Setelah runtuhnya kerajaan Gowa sebagai sebuah kerajaan maritim terbesar di Nusantara, pupuslah sudah kejayaan kemaritiman kita hal ini ditandai dengan terjadinya sebuah realitas dalam tiga alternatif:

- 1. Mereka menerima kekalahan dan keruntuhannya sebagai negara maritim dan hidup di bawah aturan VOC.
- 2. Melakukan diaspora ke seluruh wilayah Nusantara.
- 3. Bersembunyi dalam dirinya, dalam berbagai aliran tarekat yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil.

Apa yang harus dilakukan untuk membangun kejayaan kemaritiman kita kembali:

- 1. Jika kejayaan itu dihancurkan oleh sebuah kekuatan politik maka kejayaan itu harus dikembalikan melalui sebuah kekuatan politik yang sungguh-sungguh.
- 2. Seluruh bukti kehancuran itu bisa dilihat di arsip-arsip VOC yang kita miliki. Karena itu pula arsip-arsip itu harus kita pelajari untuk melihat kisi-kisi kelemahan kita agar dijadikan pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik

Bulang Sumarakko naik na nuseorok ballaku na kacinikang somberek kasiasiku



Bintoeng paleng mammumba kukana waria-waria kutuju mata kuparek

pannyaleori

Artinya:
Bulan bersinarlah engkau sinarilah rumahku agar tampak wujud kemiskinanku,

Hanya bintang kecil rupanya yang bersinar kukira sang kejora kutatap ia kujadikan pelipur lara



MEMBANGUN BUDAYA MARITIM BERBASIS ARSIP MUKHLIS PAENI, JAKARTA 2023